PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA DAERAH

(Studi kasus pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah tahun 2018-2020)

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagaian persyaratan Mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi

Disusun Oleh:

Rafi Irwan Prasetiyo

NIM : 31401700133

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG

2021

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA DAERAH

(Studi Kasus Pemerintah Daerah di Jawa Tengah tahun 2018-2020)

Disusun Oleh

Rafi Irwan Prasetiyo

NIM : 31401700133

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan kehadapan sidang panitia ujian skripsi Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 16 Desember 2021

Dosen Pembimbing

Hendri Setyawan. SE., M.PA

NIK. 0621018204

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA DAERAH

(Studi Kasus Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah Tahun 2018-2020)

Disusun Oleh :

Rafi Irwan Prasetiyo

NIM 31401700133

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 27 Desember 2021

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing	**Penguji I**
Hendri Setyawan. SE., M.PA	Dr. Sri Anik, S.E., M.Si
NIK. 0621018204	NIK. 0604086802

Penguji II

Digitally signed by Khoirul Fuad, SE., M.Si, Ak, CA

DN:cn=KhoirulFuad,SE.,M.Si,Ak,CA, o=Universitas Islam Sultan Agung Semarang, ou=Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, email=khoirulfuad@unissula.ac.id, c=ID

Khoirul Fuad, S.E., M.S.i., Ak., CA

NIK. 211413023

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada tanggal 28 Desember 2021

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si., CSRS., CSRA

NIK 211415029

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafi Irwan Prasetiyo

NIM : 31401700133

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/S1 Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA DAERAH"** merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan plagiat dari penelitian orang lain, serta tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber aslinya. Skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila pernyataan ini terbukti tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagaimana mestinya.

Semarang, 31 Desember 2021
Yang menyatakan,

Rafi Irwan Prasetiyo
31401700133

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rafi Irwan Prasetiyo

Nim : 31401700133

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/~~Tesis~~/~~Disertasi~~* dengan judul :

"PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA DAERAH"

Saya menyetujui menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberi Hak Bebas Royalti Non-eksekutif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lainnya dalam kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta Plagiarisme pada skripsi ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 31 Desember 2021
Yang menyatakan,

Rafi Irwan Prasetiyo
31401700133

**Coret yang tidak perlu*

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Rafi Irwan Prasetiyo
NIM	: 31401700133
Program Studi	: S1 Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
No.Hp / Email	: 085802206900/ Rafi.ip@std.unissula.ac.id

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/~~Tesis~~/~~Disertasi~~* dengan judul :

"**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA DAERAH**"

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannnya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Desember 2021

Yang menyatakan,

Rafi Irwan Prasetiyo

31401700133

**Coret yang tidak perlu*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat “

(HR. Abu Hurairah)

“ Setinggi apapun pangkatmu, Jangan pernah meninggalkan karakter kemanuasiaanmu “

(KH. Mukhlas Hasyim, MA)

“ Belajarlah mengalah sampai tak seorangpun mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorangpun merendahkanmu. Belajarlah sabar sampai Allah Ta'alaa mengangkat derajatmu “

(Habib Syekh Bin Abdul Qodir Assegaf)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

“ Ibu, Bapak yang telah mendoakan siang malam dan memperjuangkan saya hingga detik ini tanpa kenal lelah, berjuang memaksakan keadaan demi bisa menyelesaikan pendidikan anaknya, “

“ Kakak-Kakak saya yang telah memberi dukungan, memotivasi, menyemangati saya untuk dapat menyelesaikan tugas akhir yang paling berat ini ”

“ Ucapan beribu-ribu terimakasih saya kepada Bapak Hendri Setyawan, SE., M.PA selaku Dosen Pembimbing atas seluruh waktunya, rasa sabar arahan dan dukungan beliau dalam penyusunan Skripsi ini hingga akhir ”

ABSTRAK

Tujuan Penelitan ini dilakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *eksplanatory research*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Jumlah Populasi Penelitian ini sebanyak 35 Kabupaten/Kota Dan dengan teknik pengambilan data mengunakan *purposive sampling* diperoleh 35 Kabupaten/Kota sebagai sampel dari Tahun 2018- 2020. Variabel Independen dalam Penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Sedangkan Variabel dependennya adalah Belanja Daerah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Variabel Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif Terhadap Belanja Daerah sedangkan secara parsial Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Kata Kunci : Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze whether the General Allocation Fund, Regional Original Income and Revenue Sharing Fund affect District / City Government Regional Spending in Central Java. The type of data used is secondary data. The number of population of this study as many as 35 regencies / cities and with data retrieval techniques using purposive sampling obtained 35 regencies / cities as a sample from 2018-2020. The Independent Variables in this Study are General Allocation Fund, Regional Original Income and Revenue Sharing Fund While The dependent variable is Regional Spending. The results showed that variable general allocation funds, local native income and revenue sharing funds had a positive effect on regional spending while partially revenue sharing funds had an effect significant on regional spending.

Keywords: General Allocation Fund, Local Original Income, Revenue Sharing Fund and Regional Spending

INTISARI

Penelitian ini menguji tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap belanja daerah Pada penelitian ini digunakan 3 variabel yang diindikasikan mampu mempengaruhi belanja daerah yaitu Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Terdapat 3 hipotesis dalam penelitian ini, , yaitu : 1). Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah**.** 2). Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah**.** 3). Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah periode tahun 2018-2020. Dengan metode pengambilan menggunakan teknik *purposive sampling*. Diperoleh sebanyak 105 sampel yang memenuhi kriteria. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari pelaporan realisasi anggaran. Dalam pengujian menggunakan teknik Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan program SPSS versi 25.

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan IBM 25, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Dana ALokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah**,** Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah**,** dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah**.**

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua diberikah kesehatan hingga saat ini. Ucapan terimakasih selalu terucap atas izin Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan diberikan kelancaran. Shalawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga baginda rasulullah bersedia mengakui kita semua sebagai umatnya dan bersedia memberikan syafaat kepada kita semua.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis mengambil judul "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah dalam Studi Kasus Pemerintah Daerah di Jawa Tengah" guna memenuhi salah satu persyaratan memeroleh gelar Sarjana (S-1) Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dan kesuksesan dalam proses penyusunan ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya karena telah melancarkan segala urusan penulis sehingga proses penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tua saya yang telah berjuang demi bisa membiayai pendidikan anak-anaknya, hingga detik ini beliau terus berjuang demi

kebahagiaan anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikah keberkahan hidup, kesehatan, keselamatan dan dipanjangkan umurnya serta memberikan surga di akhirat kelak.

3. Ibu Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Winarsih, SE., M.Si., CSRS., CSRA selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kelancaran pelayanan dalam urusan Akademik.
5. Bapak Hendri Setyawan, SE., MPA selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan sangat sabar untuk memberikan penyemangat dan kepeduliannya atas segala permasalahan pribadi penulis, serta bimbingan, motivasi, kritik, pengarahan dan saran yang sangat membantu bagi penulis. Semoga Allah SWT memberikan segala kemudahan dalam segala urusan begi beliau, dan semoga beliau sekeluarga diberikan keberkahan hidup, dan kesehatan.
6. Bapak Khoirul Fuad, SE., M.Si., Ak.,CA dan Ibu Dr. Sri Anik, SE., M.Si. selaku dua dosen penguji saya yang telah dengan baik hati memberikan kemudahan dan kelancaran revisi serta persetujuan penelitian saya, semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur sekeluarga
7. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.

8. Kakak-kakak saya yang selalu memberikan doa tiada hentinya, semangat dan memotivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Semoga Allah SWT selalu merahmati dan selalu melindungi kalian di dunia dan akhirat.
9. Sahabat dan Support terhebat saya Agung, Dhani, Ismi serta sahabat saya (Mimin, Eja, Eva, Amelia, Mia, azmi, abrar, Irfan, Qiqi, Ulik, Luki, Fajrul, Robi, Umam, kresno dan yang tidak bisa disebutkan satu per satu) yang selama ini telah sudah mendoakan, memberikan semangat dan memberikan motivasi untuk saya supaya fokus mengerjakan skripsi ini.
10. Keluarga DPM FE 2018-2019 dan 2019-2020 terimakasih untuk kebersamaannya selama ini, yang selalu memberikan semangat agar dapat dengan tepat waktu menyelesaikan semua ini
11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Terimakasih atas bantuan yang diberikan semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan kepada kalian semua.

Semarang, 31 Desember 2021
Penulis

Rafi Irwan Prasetiyo

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN PENGESAHAN ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN iii
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
INTISARI x
KATA PENGANTAR xi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 10
1.3 Pertanyaan Penelitian 10
1.4 Tujuan Penelitian 10
1.5 Manfaat Penelitian 11
BAB II 12
KAJIAN TEORI 12
2.1 Teori Keagenan 12
2.2 Variabel Penelitian 13
2.2.1 Dana Alokasi Umum 13
2.2.2. Pendapatan Asli Daerah 15
2.2.3. Dana Bagi Hasil 21
2.2.4. Belanja daerah 22
2.3 Penelitian Terdahulu 26
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengengembangan Hipotesis 28
2.4.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah 29
2.4.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah 30
2.4.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah 32
2.5 Kerangka Pemikiran 33
BAB III 35
METODOLOGI PENELITIAN 35
3.1 Jenis Penelitian 35
3.2 Sumber Data Penelitian 35
3.3 Populasi dan Sampel 36
3.4 Teknik Pengambilan Sampel 36
3.5 Metode Pengumpulan Data 37

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 37
3.6.1 Variabel Dependen 37
3.6.2 Variabel independen. 38
3.7 Teknik Analisis Data 41
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 41
3.7.2 Uji Asumsi Klasik 42
3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda 45
3.7.4 Uji Hipotesis 46
BAB IV 49
HASIL DAN PEMBAHASAN 49
4.1 Gambaran Objek Penelitian 49
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data 50
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 50
4.2.2 Uji Asumsi Klasik 53
4.2.2.1 Uji Normalitas 53
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas 56
4.2.2.3 Uji Heteroskedestisitas 57
4.2.2.4 Uji Autokorelasi 58
4.3 Analisis Regresi Linier Berganda 60
4.4 Uji Hipotesis 62
4.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 62
4.4.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 63
4.4.3 Uji Koefisien Determinasi 66
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 67
4.5.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah 67
4.5.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah 68
4.5.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Daerah 68
BAB V 70
PENUTUP 70
5.1 Kesimpulan 70
5.2 Keterbatasan Penelitian 71
5.3 Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 33

Gambar 4.1 Uji Normalitas Normal P Plot 55

Gambar 4.2 Uji Normalitas Histogram 55

Gambar 4.3 Uji Heteroskedestisitas 58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber PAD 7

Tabel 2.1 Penelitan Terdahulu 27

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 41

Tabel 4.1 Prosedur Penarikan Sampel 49

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif 50

Tabel 4.3 Uji Normalitas 54

Tabel 4.4 Multikolinearitas 56

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi 59

Tabel 4.6 Hasil Autokorelasi 59

Tabel 4.7 Durbin Watson 60

Tabel 4.8 Analisis Regresi Linier 61

Tabel 4.9 Uji F 63

Tabel 4.10 Koefisien Deerminasi 66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Tabulasi 2018 1 80

Lampiran 2 Data tabulasi 2019 1 81

Lampiran 3 Data tabulasi 2020 1 82

Lampiran 4 Website Sumber Data 1 83

Lampiran 5 Uji statistik deskriptif 1 84

Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik 1 85

Lampiran 7 Analisis Regresi 1 89

Lampiran 8 Uji Hipotesis 1 90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara dengan sistem kedaulatan daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Menurut Undang Undang No 23 (2004), tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah sebuah sistem desentralisasi oleh pemerintah pusat yang memberikan wewenang kepada pemda. Otonomi daerah sangat memberikan dampak besar berupa peluang kepada masing-masing daerah untuk bisa memaksimalkan kinerjanya. Dengan adanya sistem desentralisasi tersebut, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengetahui potensi daerahnya sendiri dan berusaha untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Pelaksanaan wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah harus dioptimalkan terutama digunakan untuk kepentingan publik. Disisi lain pelayanan publik perlu didukung dengan disediakannya fasilitas publik yang berkualitas serta pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Desentralisasi fiskal diserahkan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah dengan tujuan supaya pemerintah daerah mampu mengelola dan mengurus sendiri kebutuhan urusan pemerintahan daerahnya tanpa campur tangan dari pemerintah pusat., maka pemerintah pusat memberikan hak atas wewenang serta

pengambilan keputusan, administrasi, serta manajemen pada wilayah otonom yang merupakan salah satu dari bentuk pelaksanaan undang-undang tentang otonom wilayah dapat menjadi kerangka administrasi moneter teritorial.. Hal tersebut mempunyai dampak pada terbukanya kesempatan untuk pemerintah wilayah guna mulai meningkatkan seluruh wujud kemampuan maupun keanekaragaman yang dimiliki oleh daerah seiring terkait kebutuhan dan aspirasi yang diajukan oleh masyarakat yang berkembang di daerah tersebut, sehingga mengharuskan pemerintah daerah mengelola sebaik mungkin seluruh pendapatannya. Tetapi, pada realitasnya tidak seluruh wilayah sanggup untuk lepas dari ketergantungannya terhadap pemerintah pusat dalam penuhi kebutuhannya. Hal tersebut menyebabkan ketimpangan fiskal antar wilayah di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan yang berasal dari Anggaran Pemasukan serta Belanja Nasional (APBN) yang diperuntukan guna pengalokasian dana kebutuhan wilayah yang hendak digunakandalam rangka peningkatan fasilitas sarana pelayanan publik, memajukan perekonomian daerah sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, standar kehidupan maupun kesehatan, serta meningkatkan pembangunan daerah.

Berlakunya UU Nomor 25 (1999) tentang Perimbangan Keuangan Pusat serta Wilayah, bawa pengaruh atas pergantian mendasar atas sistem dan mekanisme manajemen Pemerintah wilayah. Undang- undang ini menegaskan bahwa guna pelaksanaan kewenangan Pemerintah wilayah, Pemerintah pusat hendak mengirimkan Dana Perimbangan ke Pemerintah wilayah. Dana

Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Di samping Dana transfer itu, Pemerintah daerah masih mempunyai sumber pembiayaan tersendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pinjaman daerah, ataupun pendapatan daerah lainnya yang legal. Pemakaian atas seluruh dana tersebut sepenuhnya ditujukan unruk pemda dalam upaya mengatur kebijakannya dengan sebaik-baiknya. Transfer antar pemerintah ialah fenomena universal yang berlangsung di seluruh negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya bahkan telah jadi karakteristik yang sangat menonjol dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan daerah meningkatnya pembangunan daerah secara pesat tentu membutuhkan alokasi dana yang besar dari pemerintah daerah sehingga memberikan efek pada peningkatan pendanaan atas pos-pos belanja daerah yang terdiri atas pembiayaan harian dan pembiayaan pembangunan akan membutuhkan anggaran biaya yang mencukupi untuk pendanaan kegiatan yang sedang berlangsung. Dengan belanja yang mengalami peningkatan maka pemerintah daerah membutuhkan anggaran biaya yang tinggi agar belanja dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemerintah wilayah bisa terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemda, diharapkan hal tersebut berdampak atas meningkatnya kualitas pelayanan untuk masyarakat menjadi lebih memuaskan serta lebih baik dan tentunya kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat secara bertahap.

Belanja daerah yaitu segala kewajiban Wilayah yang diakui selaku pengurang nilai kekayaan bersih pada periode tahun anggaran berjalan PP No 12

(2019). Belanja daerah harus dilakukan secara efisien dan efektif dalam pengalokasian dana nya, belanja daerah bisa di artikan sebagai penilaian kepada pemerintah daerah dalam kesuksesan implementasi atas kewenangannya. Disisi lain dengan adanya system otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk sebisa mungkin mengelola keuanganya dengan baik dan tentunya efektif. Belanja daerah ialah sebuah tanggung jawab suatu pemerintah daerah dalam satu anggaran yang berasal dari pengeluaran dalam RKUD (Rekening Kas Umum Daerah). Belanja daerah sendiri terbagi kedalam dua bagian, belanja belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung memiliki beberapa pembagian yaitu belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa. Sedangkan, belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, subsidi, bunga, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja tidak terduga, dan bantuan keuangan Permendagri No. 13 (2006).

Menurut Mulyati dan Yusriadi (2018) DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan fiskal antar wilayah dalam membiayai pengeluarannya. Disisi lain menurut Halim (2002) DAU ialah dana yang asal sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan difungsikan dengan sebuah tujuan yaitu untuk pemerataan keuangan daerah dalam upaya pembiayaan kebutuhan pengeluaran dalam upaya implementasi desentralisasi. Tujuan DAU yaitu agar suatu wilayah mampu membiayai kebutuhan wilayah otonomnya, maka implementasi atas desentralisasi memperioritaskan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah satu dengan daerah yang lainnya. Dana ini merupakan kategori dana yang ditransfer dari pemerintah pusat yang ditujukan untuk pemerintah daerah dengan sumber

dari APBN dan dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan supaya pemerintah pusat mampu meratakan kemampuan keuangan antar daerah supaya bisa dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka penerapan desentralisasi. Dana Alokasi Umum sendiri merupakan salah satu dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat dan ditujukan kepada pemerintah daerah untuk digunakan dalam pembiayaan atas pendanaan untuk kebutuhan umum daerah dalam rangka pengimplementasian sistem desentralisasi. Namun hal tersebut membuat pemerintah daerah mempunyai ketergantungan terhadap DAU seperti menurut Rukmana (2013) dan Julitawati (2012) menyimpulkan jika DAU berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemda. Besarnya proporsi DAU yang diterima oleh pemda akan mempengaruhi sistem kinerja keuangan pemda yang mengalami penurunan. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Namun dalam penelitian lain menurut Malau dkk (2020) dan Salindeho (2016) mengungkapkan bahwa DAU mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Hal itu bisa dilihat dari data DAU yang mengalami kenaikan dan diikuti oleh kenaikan belanja daerah. Kenaikan belanja daerah sendiri ialah suatu upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan fasilitas pelayanan dan sarana publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraaan masyarakat dari segi ekonomi, pendidikan maupun kesehatan.

Menurut UU Nomor 33 (2004) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang sumbernya berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Sedangkan menurut peneliti Ernayani (2017) PAD merupakan salah satu komponen penerimaan/pendapatan daerah disamping dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Semakin besar PAD dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki oleh daerahnya, maka semakin besar juga kebutuhan daerah yang didanai oleh PAD. Dengan adanya sistem desentralisasi fiskal maka pemerintah pusat memberi kebebasan kepada pemda untuk mengatur dan mengalokasikan seluruh sumber penerimaan berupa PAD dalam pendanaan pengeluaran dalam upaya peningkatan pertumbuhan, kemandirian dan pembangunan ekonomi daerah. Dengan adanya PAD yang dimiliki, memberikan efek pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan daerah tersebut. Jadi, semakin mampu tingkat kemandirian sebuah daerah dapat membuktikan tanda bahwa daerah itu mampu menutupi kekurangannya dan berhasil mengatasi pembiayaan pengeluaran daerah tanpa sedikitpun bergantung kepada transfer dari pemerintah pusat. Secara garis besar semakin tinggi tingkat pendapatan asli daerah dan semakin tinggi pula kesanggupan daerah dalam rangka pembiayaan kebutuhan daerah maka hal itu dapat dijadikan sebagai tanda jika keuangan daerah tersebut memiliki tingkat kinerja yang positif. Dalam hal ini, tingkat kinerja yang positif dapat disebut dengan kemampuan daerah dalam pembiayaan pengeluarannya sendiri sebagai bentuk kemandirian daerah. Dalam hal ini sumber dana daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dan khusus yang berasal dari Pajak Daerah serta

Retribusi Daerah yang sekarang menjadi sumber penrimaan daerah yang mendominasi dikarenakan tingkat presentase hak pemerintah daerah mencapai 90%.

PAD di Jawa Tengah terdiri atas retribusi, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan penerimaan lain-lain sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah Tahun 2019-2020
(dalam juta rupiah)

PAD	Tahun		
	2018	2019	2020
Pajak Daerah	Rp 11.507.119.643	Rp 5.640.466.498	Rp 5.576.877.434
Retribusi Daerah	Rp 104.870.145	Rp 852.007.078	Rp 1.030.260.598
Bagian Laba BUMD	Rp 459.626.768	Rp 577.824.873	Rp 621.607.625
Lain-lain PAD yang Sah	Rp 1.640.219.482	Rp 7.157.304.581	Rp 7.168.126.625
Total PAD	**Rp 13.711.836.038**	**Rp 14.227.603.030**	**Rp14.396.872.282**

Tabel 1.1 Sumber PAD 1

Sumber data : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Realisasi pendapatan daerah di provinsi Jawa Tengah dari tahun 2018 hingga 2020 dilihat dari Data peningkatan realisasi pendapatan daerah yang menunjukkan bahwa PAD dari pajak masih menjadi sumber penerimaan yang sangat mendominasi, sedangkan pendapatan lain yang bersumber dari retribusi pajak daerah menempati posisi kedua. Hal mempunyai arti jika pajak daerah dan retribusi masih menjadi sumber terbesar bagi penerimaan daerah. Dengan

tingginya proporsi PAD yang diterimah provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 hingga 2020, menunjukkan terjadinya tingkat pola yang cenderung naik pada penerimaan daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) menurut Pradipta dan Jatmiko (2018) adalah suatu pendapatan daerah yang pendanaannya berasal dari pajak dan sumber daya alam, tingginya DBH tergantung dari peranan pemda terhadap pajak daerah dan penerimaan sumber daya alam. Sedangkan menurut UU No 23 (2004) Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Adapun DBH yang diperoleh pemerintah mempunyai tingkat proporsi pendapatan yang lebih banyak dibanding dengan pemerintah pusat. Fungsi DBH antara lain dipakai setiap pemerintahan daerah untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan akan diimplementasikan melalui belanja daerah.

Penelitian mengenai Belanja Daerah sebagai variable dependen telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya Jolianis (2014) yang mengungkapkan jika dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Pendapat tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Malau dkk (2020) yang mengungkapkan bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. peneliti Ernayani (2017) juga menyatakan daalam penelitiannya bahwa dana alokasi umum dan

endapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap belanja daerah. Pradipta dan Jatmiko (2018) menyatakan dalam Hasil pengujian hipotesisnya bahwa Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif terhadap belanja daerah.

Namun dalam penelitian lain menurut Amalia dkk (2015) dalam hasil penelitiannya yang mengungkapkan jika Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap belanja daerah. Dan menurut peneliti Pradipta dan Jatmiko (2018) yang mengungkapkan DAU tidak mempengaruhi belanja daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai factor-faktor yang berpengaruh terhadap belanja daerah masih relevan untuk dilakukan penelitian kembali sehubungan dengan adanya perbedaan hasil akhir penelitian. Hal tersebut menjadikan peneliti tertarik untuk meneliti dan menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah. Penelitian ini mengacu pada hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Jolianis (2014). Selain Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah, terdapat salah satu penerimaan daerah yang berperan penting dalam pembangunan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masayarakat yang diimplementasikan melalui belanja daerah, yaitu Dana Bagi Hasil, Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain : (1) Penelitian ini menambahkan variable Dana Bagi Hasil sebagai variable independen. (2) Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada wilayah provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya dilakukan di wilayah Jawa Tengah dan DIY. (3) Tahun penelitian yaitu tahun 2019 – 2020 yang sebelumnya dilakukan pada tahun 2004.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan *reseacrh gap* diatas ditemukan masih adanya ketidak konsistenan temuan hasil penelitian terkait hal-hal yang mempengaruhi DAU, PAD dan DBH terhadap belanja daerah. Sehingga muncul sebuah rumusan masalah baru antara pengaruh DAU, PAD dan DBH terhadap Belanja Daerah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan deskripsi yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah?
3. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh DBH terhadap Belanja Daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, peneliti berharap hasil yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris, ilmu pengetahuan dan penambahan wawasan mengenai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil pada belanja daerah serta menambah referensi di lingkungan akademis

2. Praktis

   a. Bagi Pemerintah Daerah

      Diharapkan bisa dijadikan sumber referensi terkait pandangan tentang alokasi APBD dan mampu digunakan sebagai tambahan informasi dan masukan dalam proses penetapan keputusan dan dalam menjalankan fungsi pengawasan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Teori yang mendeskripsikan tentang kaitan antara principal serta agent yang bersumber dari teori ekonomi, teori organisasi, sosiologi, dan teori keputusan. Teori principal dan agent menelaah antara dua barisan kontraktual atau lebih suatu kelompok, individu, ataupun organisasi. Pihak (principal) membentuk sebuah perjanjian, baik secara eksplisit ataupun implisit, dengan pihak yang lain atau yang disebut *(agent)* dengan harapan jika agen akan mampu mengerjakan pekerjaannya seperti yang telah dikehendaki principal (dalam hal ini terjadi pemberian delegasi atas kewenangan) Sarwono (2011). Dalam sebuah organisasi hubungan seperti ini biasanya pihak atasan yang berperan sebagai principal dan pihak bawahan yang berperan menjadi agent. Teori antara hubungan kedua pihak tersebut disebut sebagai teori keagenan.

Berlandaskan ilmu pemerintahan, teori ini juga bisa diimplementasikan, yaitu antara fungsi pemda yang berperan sebagai eksekutif dengan fungsi perwakilan rakyat yang bertugas sebagai legislatif. Berlandaskan dari kedua perbedaan fungsi tersebut, eksekutif berfungsi untuk menjalankan pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah serta perencanaan, sedangkan legislatif mempunyai peran aktif dalam menjalankan legislasi, pengawasan, serta penganggaran. legislatif mempunyai kewenangan untuk mengangkat memilih serta memberhentikan kepala daerah. Hal ini mempunyai arti bahwa ada posisi

yang tidak sebanding antara eksekutif dan legislatif, di mana legislatif mempunyai hak kekuasaan yang lebih tinggi. Artinya, legislatif memberikan suatu tugas kepada kepala daerah yang telah dipilih dengan konsekuensi dapat diberhentikan apabila kepala daerah tidak mampu menjalankan tugas tersebut seperti yang dikehendaki oleh legislatif. Dalam hubungan keagenan antara pihak eksekutif dan legislatif, dimana Pemda yang berperan sebagai eksekutif atau agen dan legislatif (DPRD) yang berperan sebagai prinsipal. Pemda mempunyai tugas dalam penyusunan anggaran daerah yang berbentuk RAPBD yang kemudian akan diberikan ke DPRD untuk dicek lebih lanjut. Jika RAPBD sudah sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka pihak legislatif (DPRD) mempunyai tugas dan wewenang dalam pengesahan dari RAPBD menjadi APBD atau bias disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah. Yang kemudia pihak legislatif (DPRD) menjadikan APBD sebagai instrument untuk pengawasan terhadap tingkat kinerja pihak eksekutif (Pemda). Penyusunan APBD yang dirancang oleh pihak eksekutif dan legislatif tetap bertumpu terhadap Kebijakan Umum APBD dan Plafon Anggaran. Rancangan APBD dibuat oleh pihak eksklusif yang kemudian akan diberikan kepada pihak legislatif untuk diteliti dan dianalisis bersama-sama dalam rapat sebelum akhirnya diresmikan sebagai Perda.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Dana Alokasi Umum

Dana alokkasi Umum ialah dana yang sumbernya berasal dari APBD yang difungsikan dengan tujuan untuk meratakan kemampuan daerah dan membiayai kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi UU Nomor 33 Tahun (2004). Dengan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengandalkan satu sumber dana namun mampu mengoptimalkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Sehingga daerah yang memiliki potensi fiscal yang besar namun keperluan fiskalnya kecil, maka daerah tersebut akan mendapatkan alokasi DAU yang relatif lebih sedikit disbanding dengan daerah lainnya. Begitu juga dengan daerah yang mempunyai potensi fiskal kecil namun kebutuhan fiskalnya besar, makan akan mendapat alokasi DAU yang relatif banyak Pradipta dan Jatmiko (2018).

Tujuan DAU diharapkan mampu untuk mengatasi ketimpangan fiskal yang terjadi antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar Pemerintah Daerah karena tidak meratanya sumber daya atau perbedaan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Berdasarkan UU Nomor 33 (2004) proporsi Dana Alokasi Umum ditetapkan dengan presentase sebesar 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri yang telah diatur dalam regulasi sesuai APBN. Disisi lain, proporsi

pembagian DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur sesuai dengan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam website www.djpk.kemenkeu.go.id terdapat tahapan anggaran Dana Alokasi Umum, antara lain:

a. Tahapan Akademis

Konsep pertama dalam menyusun aturan atas penerapan metode Dana Alokasi Umum dikerjakan oleh Tim Independen dari berbagai instansi pendidikan perguruan tinggi dengan tujuan untuk mendapatkan kebijakan penghitungan DAU yang sejalan dengan ketentuan Undang-Undang dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

b. Tahapan Administratif

Pada proses ini Depkeu Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk melakukan berbagai persiapan data yang akan digunakan sebagai aturan anggaran DAU termasuk yang didalamnya terdapat aktivitas pengukuhan dan verifikasi data dalam upaya agar memperoleh kemutakhiran dan validitas data yang akan dipergunakan.

c. Tahapan Teknis.

Ialah suatu proses atau tahap perancangan simulasi penghitungan DAU yang kemudian dimusyawarahkan Pemerintah kepada DPR RI dan tetap dilakukan berdasarkan

regulasi yang telah ditetapkan sebagaimana yang diinstruksikan UU beserta menggunakan data yang tersedia serta tetap memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

d. Tahapan Politis.

Ialah tahapan terakhir, ulasan penghitungan dan alokasi DAU antara Pemerintah dengan Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk dikonsultasikan dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan hasil penghitungan DAU.

2.2.2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Ferdiansyah dkk (2018), Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana dalam rangka memenuhui kebutuhan daerah yang bersangkutan yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan rutin maupun pembiayaan dalam hal pembangunan, PAD terdiri atas retribusi daerah, pajak daerah , bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Dalam penelitian Rahmawati dan Fajar (2017) menyebutkan bahwa Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan oleh daerah pada daerah yurisdiksinya yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih pada satu tahun anggaran, serta harus diikuti pertumbuhannya supaya bisa menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan serta aktivitas pembangunan daerah yang setiap tahunnya terus semakin tinggi.

Kendala umum yang temui oleh Pemda di Indonesia dalam implementasi otonomi daerah ialah kurangnya penerimaan yang sumbernya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingkat rasio Pendapatan Asli Daerah yang biasanya kecil menjadi penyebab pemda mempunyai tingkatan kebebasan yang kecil dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagian besar pembiayaan, baik rutin maupun pembangunan daerah, didanai dari dana perimbangan, khususnya DAU yang bersumber dari PAD.

Menurut Undang Undang Nomor 33 (2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 6 bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari :

A. Pajak Daerah

Berdasarkan UU No 34 (2000) mengenai Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi daerah, pajak daerah ialah iuran yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa mendapatkan imbalan secara eksklusif yang seimbang yang bisa dipaksakan berdasar regulasi UU yang sudah ditetapkan, serta dipergunakan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemda atau pembangunan daerah.

seperti halnya pajak pada umumnya, pajak daerah memiliki fungsi :

a. Sebagai sumber pendapatan daerah *(budgetary*)

b. Sebagai alat pengukur *(regulatory)*

Menurut UU Nomor 34 Tahun (2000) mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah:

1. Pajak Provinsi :

a. Pajak kendaraan bermotor

b. Kendaraan bermotor bukan umum

c. Kendaraan bermotor umum

d. Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

2. Pajak kendaraan diatas air

3. Bea balik nama kendaraan bermotor:

Penyerahan pertama :

a. Kendaraan bermotor bukan umum

b. Kendaraan bermotor umum

c. Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Penyerahan kedua :

a. Kendaraan bermotor bukan umum

b. Kendaraan bermotor umum

c. Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Penyerahan kerena wasiat :

a. Kendaraan bermotor bukan umum

b. Kendaraan bermotor umum

c. Kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

4. Bea balik nama kendaraan di atas air :

a. Penyerahan pertama

b. Penyerahan kedua

c. Penyerahan karena wasiat

5. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

6. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah dan air permukaan

7. Pajak Kabupaten dan Kota

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

g. Pajak Parkir

B. Retribusi Daerah

Retribusi daerah ialah pembayaran kepada Negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan layanan yang telah disediakan dan menjadi hak negara, yang dapat diartikan retribusi daerah sebagai pembayaran dari pemakaian jasa atau sebab mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang mempunyai kepentingan atau layanan yang diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Retribusi Daerah merupakan iuran daerah sebagai pembiayaan atas jasa atau pengeluaran izin tertentu yang khusus dilayankan dan/atau difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk keperluan orang pribadi atau badan Undang Undang Nomor 28 Tahun (2009)

Retribusi daerah dapat dibagi menjadi beberapa kelompok antara lain:

a. Retribusi jasa umum, ialah retribusi atas jasa yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh seluruh golongan lapisan masyarakat.
b. Retribusi jasa usaha, ialah retribusi atas jasa yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial

karena pada umumnya fasilitas tersebut bias saja disediakan oleh pihak swasta.

c. Retribusi perizinan tertentu, ialah retribusi atas aktivitas tertentu pemerintah daerah dalam rangka memberikan izin ke orang pribadi atau badan yang ditujukan dalam rangka pelatihan, pengaturan, pengendalian dan supervisi atas aktivitas pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana, atau fasilitas eksklusif dalam upaya melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang modal sebagiannya atau keseluruhannya menjadi hak milik kekayaan daerah yang dipisahkan terkecuali atas ketenruan lain dengan atau didasari oleh Undang-undang. Sebagian laba yeng dihasilkan oleh perusahaan daerah adalah satu sumber diantara banyak sumber PAD yang disebut dengan bagian laba BUMD, BUMD dibentuk oleh pemerintah daerah, yang didalamnya terdiri dari perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan dan perbankan (bank pembangunan daerah dan bank pasar) dan dibidang lain, seperti jasa di sektor industri, jasa air bersih (PDAM), perkebunan, pertanian dan lain-lain. Melayani masyarakat dengan cara yang lebih efisien yaitu dengan menggunakan BUMD yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan

yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, penjualan saham milik daerah dan deviden lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan lain-lain Daerah kabupaten atau kota merupakan suatu pendapatan yang diterima pemerintah daerah diluar pajak, retribusi, bagian laba BUMD. Sebagian contoh pendapatan yang tergolong kedalam bagian pemda dan jasa giro rekening pemerintah daerah kabupaten dan kota.

2.2.3. Dana Bagi Hasil

DBH ialah suatu dana perimbangan yang sumbernya berasal dari APBN yang sengaja ditujukan kepada daerah berdasarkan angka rasio untuk membiayai keperluan daerah dalam upaya implementasi desentralisasi UU Nomor 33 (2004). Menurut yusriadi (2017) dalam Malau dkk (2020) mengemukakan bahwa Dana Bagi Hasil merupakan penerimaan yang berpotensial yang digunakan sebagai sumber modal dalam pendanaan kepentingan pembangunan dan belanja daerah. Semakin tinggi Dana Bagi Hasil maka ekspekktasi tentang tingkat pembangunan akan ikut semakin tinggi. Dalam hasil penelitiannya menyebutkan jika daerah yang menerima DBH yang besar, maka proporsi belanja daerahnya pun menjurus ikut mengalami peningkatan.

DBH harus dilaksanakan dengan prinsip menurut sumbernya, dalam penelitian Lian Arke dkk (2020) menyebutkan bahwa berdasarkan sumbernya DBH dibedakan menjadi beberapa bagian seperti, DBH

Perpajakan dan DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA). DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Alokasi DBH Perpajakan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Setiap awal tahun anggaran Menteri Keuangan menetapkan alokasi sementara DBH Perpajakan yang menjadi dasar penerbitan DIPA untuk penyaluran Triwulan I, II dan III atau Tahap I/II atas bagian pemerintah pusat yang disalurkan kembali ke daerah dan atas bagian daerah. Pada akhir tahun anggaran Menteri Keuangan menetapkan Alokasi Definitif DBH Perpajakan yang merupakan dasar penerbitan DIPA untuk penyaluran pada Triwulan/Tahap akhir.

2.2.4. Belanja daerah

Belanja daerah mencakup seluruh biaya dari rekening kas umum daerah yang dapat menurunkan ekuitas dana, artinya kewajiban daerah pada satu tahun anggaran serta tidak mendapatkan pembayarannya balik dari daerah. Belanja daerah dirincikan berdasarkan urusan pemerintah daerah yang berbeda, atau organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja. Belanja daerah pergunakan dalam upaya pendanaan pelaksanaan kepentingan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota, urusan pilihan serta urusan yang penanganannya pada bagian atau bidang eksklusif yang bisa

dilaksanakan antar pemerintah serta Pemerintah Daerah atau antar pemda yang ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Belanja Daerah ialah segala bentuk kewajiban daerah yang dicatat kemudian diakui sebagai penurunan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan PP Nomor 12 (2019). Belanja daerah juga dapat disebut sebagai seluruh pembiayaan kas daerah pada periode tahun bersangkutan yg mengurangi kekayaan pemda. pada struktur anggaran daerah menggunakan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci berdasarkan organisasi, fungsi, gerombolan serta jenis belanja.

Belanja daerah dibagi menjadi belanja rutin, belanja investasi, pengeluaran transfer dan pengeluaran tidak tersangka.

1. Belanja Rutin

Belanja rutin merupakan pembiayaan yang mempunyai manfaat sebatas satu tahun anggaran serta tidak menambah asset kekayaan bagi daerah, belanja rutin terdiri atas Belanja administrasi umum :

a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang
c. Belanja Perjalanan Dinas
d. Belanja Pemeliharaan
e. Belanja operasi dan pemeliharaan saran dan prasarana

2. Belanja Investasi

Belanja investasi merupakan suatun pembiayaan yang mempunyai manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau

kekayaan daerah, serta selanjutnya akan menambah aturan rutin untuk anggaran operasional serta pemeliharaannya. Belanja investasi terdiri dari :

a. Belanja Publik : belanja yang mempunyai manfaat yang bisa dinikmati secara eksklusif oleh masyarakat. Belanja publik ialah belanja modal yang berupa investasi fisik yang memiliki nilai hemat lebih dari setahun dan menyebabkan terjadinya peningkkatan asset daerah.
b. Belanja Aparatur : merupakan belanja yang nilai kentungannya tidak bisa secara lansgung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur. Belanja aparatur diperkirakan memberikan keuntungan pada periode yang berjalan dan periode setelahnya.

3. Pengeluaran Transfer

   Pengeluaran transfer merupakan suatu pengalihan utang pemerintah daerah dengan kriteria :

   a. Imbalan barang dan jasa tidak diterima secara langsung seperti yang layaknya terjadi dalam pembelian dan penjualan.
   b. Tidak menganggap pembayaran kembali diperiode yang akan datang, seperti yang terjadi pada transaksi pinjaman.
   c. Tidak menganggap adanya imbal hasil pendapatan, seperti layaknya yang diharapkan pada kegiatan atau transaksi investasi. Pembiayaan transfer berisi atas angsuran pinjaman, dana bantuan dan dana cadangan.

4. Pengeluaran Tidak Tersangka

Pengeluaran tidak tersangka merupakan pendanaan yang disediakan untuk Pembiayaan:

a. Kejadian-kejadian darurat seperti bencana alam, atau kejadian yang dapat Membahayakan daerah.
b. Tagihan tahun lain yang belum diselesaikan dan /atau yang tidak tersedia anggarannya di tahun kemudian yang bersangkutan.
c. Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan /atau kelebihan penerimaan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
Jolianis	2014	Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Dana alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat
Wia Rizqi Amalia, Wahyudin Nor, M nordiansyah	2015	Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Pada pemerintah kabupaten atau kota di provinsi Kalimantan selatan Tahun 2009-2013	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, tetapi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus mempunyai pengaruh positif terhadap belanja daerah. Secara simultan pengaruh DAU dan DAK lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah
Sri Mulyati, Yusriadi	2017	Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dana bagi hasil dan dana alokasi umum berpengaruh positif

		Pada Provinsi Aceh	terhadap belanja daerah
Woro Tyas Pradipta, Bambang Jatmiko	2018	Pengaruh Flypaper effect, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Belanja Daerah Studi Empiris pada Provinsi Di Indonesia Tahunn 2014 - 2016	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dana alokasi umum dan Pendapatan domestic regional bruto tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah pada Provinsi di Indonesia, namun dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah
Yois Nelsari Malau Weni Listayani Lase Vera Clodia Br Sagala Dedek Lestari	2020	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pad, Dau Dan Dbh Terhadap Belanja Daerah Provinsi Aceh 2013-2017	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi bepengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja daerah, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum bepengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, dan dbh tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja daerah

Tabel 2.1 Penelitan Terdahulu 1

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengengembangan Hipotesis

Otonomi daerah merupakan hak atau kewenangan serta kewajiban suatu daerah otonom dalam mengurus sendiri dan membuat aturan terkait kepentingan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan regulasi yang telah berlaku. Sedangkan yang disebut dengan desentralisasi fiskal menurut Undang-undang No 33 (2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 yaitu penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan membuat aturan atau kebijakan untuk mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu bentuk implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia yaitu dengan dibuatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).

Dalam susunan APBD, pemda menggunakan ppendapatan yang diterimanya untuk mendanai kebutuhan belanja daerah. Pendistribusian anggaran belanja daerah merupakan acuan kesuksesan atas implementasi kewenangan daerah. Segala pembiayaan tersebut diharapkan mampu berpusat pada kepentingan pemerintah dan pemenuhan kepentingan masyarakat saja meskipun realitanya justru masih banyak didapati kesenjangan dan ketergantungan yang besar oleh pemerintah daerah

terhadap sumber dana transfer dari pemerintahan pusat, Belanja daerah sendiri merupakan semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja. Belanja daerah menurut organisasi merupakan suatu kesatuan penggunaan seperti secretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya.Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan dan fungsi-fungsi lainnya. Kelompok belanja misalnya belanja administrasi umum, belanja operasi dan biaya pemeliharaan serta belanja investasi Mulyati dan Yusriadi (2018).

2.4.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Menurut Pradipta dan Jatmiko (2018) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pemberian DAU di suatu daerah didasari atas tinggi atau rendahnya suatu celah fiskal *(fiscal gap)* yang ada pada suatu daerah, yang menjadi perbedaan antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan kapasitas daerah *(fiscal capacity).* Daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi namun kpentingan fiskalnya rendah maka daerah tersebut akan mendapatkan proporsi DAU yang relatif lebih sedikit. Begitu juga dengan daerah yang mempunyai kapasitas fiskal kecil namun untuk segi kebutuhan fiskalnya besar, makan daerah tersebut akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar. Disisi lain pemberian Dana Alokasi

Umum (DAU) kepada setiap daerah didasarkan pada besar kecilnya bobot masing-masing daerah Bowo Laksono et al (2014).

Pengaturan DAU memang difungsikan untuk mampu mengurangi kesenjangan, yang berarti daerah yang mempunyai kemampuan keuangan yang relative besar akan memperoleh bagian DAU yang relatif kecil, begitu juga sebaliknya Gani dan Kristanto (2013). Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan Amalia et al (2015) menyebutkan jika DAU masih menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi pemda untuk memenuhi kepentingan belanja. Dalam kata lain DAU Berpengaruh Positif terhadap Belanja daerah dikarenakan semakin meningkatnya belanja daerah maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan semakin meningkat.

Dari hasil penelitian yang yang telah diteliti Jolianis (2014), Bowo Laksono dkk (2014) , Mulyati dan Yusriadi (2018), , dan Malau et al (2020) menyebutkan bahwa hubungan antara DAU dan Belanja Daerah ialah searah positif. Berdasarkan pembahasan di atas maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H1 : DAU Berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

2.4.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Sebagai resiko atas penerapan desentralisasi fiskal, maka pemda mendapatkan kebebasan atas tanggung jawab untuk menggali dan memaksimalkan potensi PAD yang dimilikinya supaya mampu menutupi

berbagai kebutuhan belanja yang dibutuhkan dalam upaya pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan setiap hari. Kemampuan pemerintah daerah untuk memaksimalkan sumber anggaran sendiri merupakan suatu fundamental dasar daerah otonom untuk bangkit dalam pembangunannya. Keuangan daerah dapat dinyatakan berhasil jika secara berkelanjutan daerah tersebut mampu dalam memaksimalkan pendapatannya bersamaan dengan peningkatan perekonomian daerah.

Menurut penelitian Ferdiansyah dkk, (2018) menyebutkan bahwa alokasi belanja daerah akan semakin longgar jika suatu daerah mampu mengumpulkan penapatan asli daerahnya dengan semaksimal mungkin, maka akan menghasilkan hubungan yang searah positif antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah. Peneliti lain seperti Pradipta dan Jatmiko (2018), Ernayani (2017), Malau et al (2020) mengemukakan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap belanja daerah. Melalui PAD yang besar, diharapkan pemerintah pusat mampu menekan tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah daerah. Kondisi itu menggambarkan tingkat kinerja daerah yang lebih baik, karena pemerintah daerah yang mempunyai pendapatan PAD yang relatif besar akan mampu mengalokasikan anggaran belanja dengan lebih bebas tanpa perlu menggantungkan pembiayaan kepada dana transfer dari pemerintah pusat.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H2 : PAD Berpengaruh Positif terhadap Belanja Daerah.

2.4.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal penting bagi pemerintah daerah dalam upaya mendapatkan dana pembangunan dalam rangka memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah penerimaan daerah yang sumber dananya berasal dari pajak dan sumber daya alam, tingginya DBH tergantung pada tingkat kontribusi pemda dalam upayanya untuk meningkatkan pemasukan yang berasal dari pajak daerah dan sumber daya alamnya Pradipta dan Jatmiko (2018). Adapun DBH yang diterima oleh pemda mempunyai nilai persentase penerimaan yang cenderung lebih tinggi disbanding dengan pemerintah pusat. DBH pergunakan oleh setiap daerah dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang kemudian diimplementasikan dengan belanja daerah.

Keterkaitan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah adalah Dana Bagi Hasil menyokong pemerintah daerah dalam mendanai Belanja Daerah. Menurut peraturan Menteri Keuangan 19/PMK.07/2020, Dana Bagi Hasil digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam bidang kesehatan dan untuk perbaikan gizi. Pemerintah pusat mengalokasikan Dana Bagi Hasil berdasarkan prinsip *by origin*. Prinsip ini mengalokasikan Dana Bagi Hasil berdasarkan daerah penghasil. Artinya, pemerintah daerah yang memiliki pendapatan yang tinggi, cenderung akan mendapatkan Dana Bagi Hasil yang tinggi pula Kuncoro (2007).

Akibatnya, ketika pemerintah daerah mendapatkan Dana Bagi Hasil yang tinggi, maka pemda akan semakin mampu dalam pemenuhan kebutuhan belanja daerah yang lebih besar dari sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H3 : DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis diatas, maka dapat dibuat kerangka penelitian sebagai berikut :

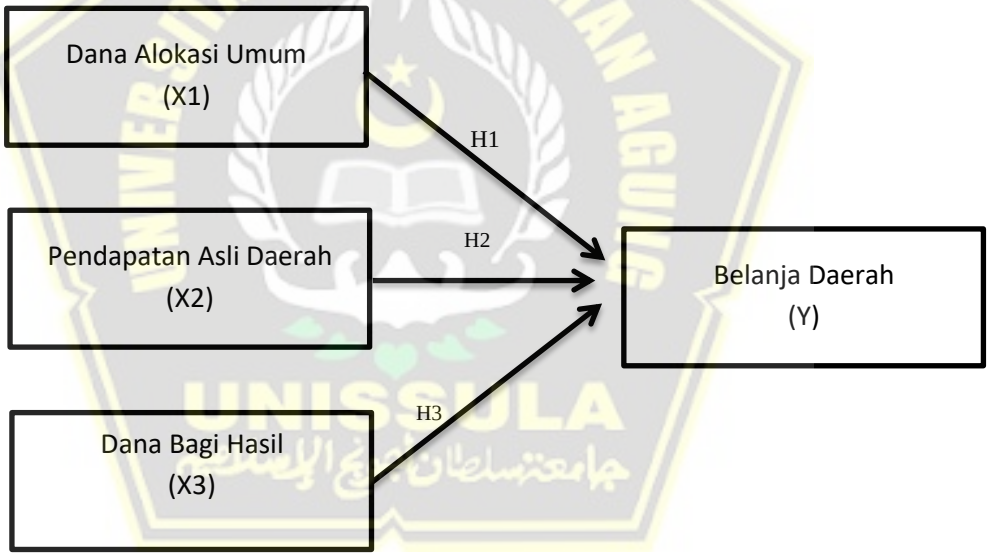

Kerangka Penelitian 1

Keterangan :

: Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y secara individual

Kerangka pemikiran di atas menggambarkan pengaruh antara Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil sebagai variabel independen sedanngkan Belanja Daerah sebagai variabel

dependen. Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil berpengaruh secara langsung terhadap Belanja daerah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanasi *(Eksplanatory Research).* Menurut sugiyono (2013) penelitian eksplanasi *(explanatory research*) merupakan penelitian yang menjelaskan kedudukan antara variable-variael serta menjelaskan hubungan antara variable yang satu dengan yang lain melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalan pendekatan kuantitatif jenis deskriptif yang dapat digunakan untuk membuat uraian yang terstruktur, factual, serta akurat terhadap sebuah fakta.

3.2 Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data yang digunakan di penelitian ini merupakan data laporan realisasi APBD yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2018 -2019 dan dikarenakan belum rilisnya data untuk tahun 2020 pada website https://jateng.bps.go.id/ maka data penelitian untuk tahun 2020 di ambil dari website https://bps.go.id/ milik Badan Pusat Statistik wilayah pusat.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Kabupaten/ Kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2018 hingga 2020. Data yang digunakan di penelitian ini bersumber dari laporan realisasi APBD tahun 2018-2020. Data tersebut akan dipergunakan untuk mendukung variabel-variabel yang dipergunakan pada penelitian ini serta menggunakan pertimbangan tertentu, yaitu:

1. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempublikasikan dan melaporkan data realisasi APBD di situs Badan Pusat Statistik (BPS).
2. Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempublikasikan data realisasi DAU, PAD, DBH, dan belanja daerah di situs BPS.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling.* Teknik pengambilan sampel *(purposive sampling)* teknik pengambilan sampel berdasarkan suatu kriteria tertentu yang dilakukan dengan mengambil sampel dari suatu populasi Jogiyanto (2014). Teknik ini tidak memberi kesempatan yang sama untuk setiap anggota populasi yang dapat dipilih untuk dijadikan sampel. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang mempunyai tujuan tertentu dan bukan didasarkan atas strata, random, atau geografi. Teknik ini biasanya dilakukan karena adanya beberapa faktor pertimbangan seperti pengambilan sampel didasarkan atas ciri-ciri, kriteria dan karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah sebuah proses yang terstruktur dalam upaya penghimpunan, atau pencatatan dan panyajian fakta untuk sebuah tujuan. Metode pengumpulan data yang dilakukan ialah metode dokumentasi yang didapatkan dari sumber data sekunder dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel independen Dana Alokasi Umum (X1), Pendapatan Asli Daerah (X2), Dana Bagi Hasil (X3), dan variabel dependen Belanja Daerah (Y1).

3.6.1 Variabel Dependen

1. Belanja Daerah

Variabel dependen dari penelitian ini ialah Belanja Daerah Menurut PP Nomor 12 (2019) tentang Pngelolaan keuangan Daerah, belanja daerah ialah segala beban daerah yang diakui selaku penurunan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang berkenaan. Anggaran pendapatan serta Belanja daerah terdiri atas 3 unsur utama, yaitu, unsur pendapatan, belanja rutin, belanja pembangunan. Belanja. daerah pada penelitian ini bisa diketahui dari Belanja daerah dihitung dengan menggunakan rumus :

Belanja Daerah = Belanja Langsung + Belanja Tidak Langsung

3.6.2 Variabel independen.

1. Dana Alokasi Umum

Variabel independen dalam penelitian ini adalan Dana Alokasi Umum. Alokasi DAU ditetapkan dengan suatu perumusan yang telah diatur dengan tetap meninjau kepentingan belanja pegawai, kepentingan fiskal, dan kemampuan daerah. Berdasarkan UU Nomor 33 (2004) menjelaskan bahwa, Dana Alokasi Umum ialah salah satu dana yang sumbernya berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang fungsikan dalam rangka kesetaraan kapasitas keuangan antar wilayah untuk pendanaan aktivitas daerah dalam upaya pengimplementasian desentralisasi. DAU dapat dikategorikan sebagai *unconditional grant* yakni transfer tak bersyarat dan juga sebagai block grant yaitu jenis transfer antar tingkat pemerintah yang todak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu Gani dan Kristanto (2013). Dana Alokasi Umum dihitung dengan menggunakan rumus:

DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal

Keterangan:

Alokasi Dasar : Gaji PNS daerah

Celah Fiskal : Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

2. Pendapatan Daerah

Menurut Undang Undang Nomor 33 (2004), pendapatan asli daerah (PAD) terdiri atas hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan daerah laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan asli daerah di penelitian ini dapat di ketahui melalui laporan realisasi APBD pemerintah daerah kabupaten dan kota di provinsi jawa tengah. Rumus menghitung pendapatan asli daerah (PAD) yaitu :

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain – lain PAD yang Sah

3. Dan Bagi Hasil

DBH ialah dana yang sumbernya berasal dari penerimaan APBN dan dialokasikan kepada daerah dengan didasarkan pada angka presentase dalam rangka mendanai kebutuhan daerah dalam upaya penerapan sistem desentralisasi UU No. 33 (2004)). Rumus menghitung Dana Bagi Hasil yaitu :

DBH = Dana Bagi Hasil Pajak + Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Ukuran	Sumber
Belanja Daerah	belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan	Belanja Daerah = Belanja Langsung + Belanja Tidak Langsung	Peraturan Pemerintah Nomor 12 (2019)
Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kegiatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi	DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal	Undang Undang Nomor 33 (2004)
Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah hasil kekayaan daerah	PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain – lain PAD yang Sah	Undang Undang Nomor 33 (2004)

Dan Bagi Hasil	Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi	DBH = Dana Bagi Hasil Pajak + Dana Bagi Hasil BUkan Pajak	Undang Undang No 33 (2004)

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 1

Keterangan :
Celah fiskal ialah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah

3.7 Teknik Analisis Data

Model analisis yang dipakai dalam penelitian ini ialah model analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda berfungsi untuk melihat dampak variabel independen (X) yang terdiri dari DAU, PAD dan DBH terhadap variabel dependen (Y) yaitu Belanja Daerah. Persamaan regresi berganda adalah persamaan regresi yang melibatkan dua atau lebih variabel dalam analisa Lian Arke dkk (2020). Tujuannya adalah untuk bias mengukur parameter-parameter estimasi dan untuk melihat apakah variabel bebas (variabel independen) mampu menjelaskan variabel terikat (variabel dependen) dan memiliki pengaruh kepadanya.

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memiliki fungsi sebagai pemahaman suatu gambaran umum terhadap sebuah objek yang diteliti, statistik deskriptif dipergunakan dalam upaya menguraikan suatu data yang

mengungkapkan pengukuran rata – rata (mean), standar deviasi dan maksimum minimum Ghozali (2011)

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linear berganda dapat dilangsungkan setelah model dari penelitian ini mampu melengkapi syarat yaitu dengan lolos dari uji asumsi klasik. Syarat pertama yang harus dilengkapi yaitu data tersebut harus tersebarkan secara normal, yang kedua data tidak mengandung multikoloniaritas dan yang terakhir heteroskedastisitas. Untuk itu sebelum dilakukan uji regresi linier berganda perlu dilakukan terlebih dulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan suatu distribusi yang menunjukan sebaran data yang seimbang, yang ditunjukan sebagaian besar data berada pada nilai tengah Gani dan Kristanto (2013). Uji normalitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji f dan ft mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Suatu data bisa diartikan sebagai data distribusi normal, jika data tersebut baik dan layak untuk dapat membuktikan model – model penelitian tersebut. Model regresi yang baik adalah model yang berdistribusi normal atau mendekati normal, ada dua cara untuk

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan uji statistik dan uji grafik.

a) Uji Statistik

Uji Normalitas dengan grafik dapat menyesatkan jika tidak hati – hati secara visual akan terlihat normal, pada hal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu dianjurkan disamping menggunakan uji grafik perlu dilengkapi kembali dengan menggunakan uji statistik. Uji statistic sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual.

2. Uji Multikoliniearitas

Uji multikoliniearitas merupakan uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen dengan variabel independen lainnya dalam regresi berganda. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Menurut Gani dan Kristanto (2013) salah satu cara dari beberapa cara untuk menemukan gejala multikoliniearitas ialah dengan menggunakan atau melihat tool yang disebut *Variance Inflation Factor* (VIF).

a. Jika nilai *Tolerance* < 10 % dan nilai *Variance Inflation Factor* > 10 %, maka terjadi multikoliniearitas antar variabel independen.
b. Jika nilai *Tolerance* > 10 % dan nilai *Variance Inflation Factor* < 10 %, maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk memeriksa apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu observasi ke observasi yang lain. Jika variance dari residual satu observasi ke observasi yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika beragam maka disebut sebagai heteroskedastisitas Imam Ghozali (2011). Umumnya data *crossection* mengandung kedudukan heteroskesdatistas sebab data ini menyimpan data yang mewakili dari berbagai segi ukuran (kecil, sedang dan besar). Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas :

1) Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di *stundentized*. Dengan dasar analisis :

   a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasi telah terjadi heterokesdastisitas.

b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dandibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokesdastisitas.

Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plot.

2) **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi ini digunakan untuk suatu tujuan yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar anggota serangkaian data yang dilakukan observasi dan dianalisis menurut ruang atau menurut waktu, *cross section* atau time series. Dalam penelitian Ferdiansyah et al (2018) menyebutkan bahwa Uji *auto* korelasi mempunyai tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya), jika terjadi korelasi maka dapat disebut dengan *problem auto korelasi.*

3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Widarjono (2013), regresi ini berungsi untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi hubungan antar suatu variable dependen dengan satu atau lebih variable independen. Pada penelitian ini variable independen yang digunakan yaitu DAU, PAD dan DBH dengan

variable independen Belanja Daerah. Adapun model regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$BD = \alpha + \beta 1\ DAU + \beta 2\ PAD + \beta 3 DBH + e$$

Keterangan :

BD = Belanja Daerah

α = Konstanta Regresi

β1; β2; β3 = Koefisiensi Regresi Masing – masing Variabel Independen

DAU = Dana Alokasi Umum

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH = Dana Bagi Hasil

e = *Eror term*

3.7.4 Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap suatu masalah, untuk itu perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui kebenarannya dengan menggunakan uji hipotesis.

1. Pengujian Simultan (Uji f)

   Menurut Imam Ghozali (2013) model uji *goodness of fit* ini dipergunakan sebagai penilaian ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Secara statistik, *goodness of fit* suatu model F dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap suatu masalah, untuk itu perlu dilakukan pengujian untuk

mengetahui kebenarannya dengan menggunakan uji hipotesis. Pengujian signifikansi simultan (uji F) dengan tujuan sebagai petunjuk pembantu apakah keseluruhan variabel independen yang dipergunakan dalam model regresi berpengaruh signifikan secara bersamaan terhadap variabel dependen Ferdiansyah dkk (2018).

a. Jika Sig F = 0,000 > 0,05 atau 5%, maka H0 diterima. Artinya adanya hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen
b. Jika Sig F = 0,000 < 0,05 atau 5%, maka H1 ditolak. Artinya tidak ada hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen.

2. Pengujian Parsial (Uji t)

Pengujian regresi secara parsial (uji t) digunakan sebagai alat dalam melakukan pengujian pengaruh dari setiap variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dan untuk memahami ada atau tiak pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen dapat diperhatikan dengan membandingkan nilai probabilitas dari setiap variabel dengan tingkat signifikansi 0,05. Dalam uji statistik F terdapat 2 keputusan kriteria diantaranya yaitu :

a. Jika Sig t = 0,000 < 0,05 atau 5%, maka H0 diterima. Artinya ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Jika Sig t = 0,000 > 0,05 atau 5%, maka H1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3. Koefisien Determinasi (R2)

Menurut Ghozali (2016) Koefisien determinasi (R2) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable terikat. Nilai koefisien determinasi berada di antara 0 dan 1. Nilai yang semakin mendekati angka 1 maka variabel bebas semakin baik dalam menjelaskan variabel terikat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

Objek yang digunakan di penelitian ini merupakan seluruh kabupaten/kota yang berada di provinsi jawa tengah yang terdiri atas 35 kabupaten/kota . Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder, yaitu merupakan data yang tidak dikumpulkan secara langsung. Melalui website Badan Pusat Statistik (https://jateng.bps.go.id/) berupa data APBD periode tahun 2018-2019 dan data APBD tahun 2020 diperoleh dari website (https://www.bps.go.id/).

Tabel 4.1

Prosedur penarikan sampel

No	Keterangan	Tahun 2018 - 2020
1	Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempublikasikan data realisasi APBD di situs Badan Pusat Statistik (BPS)	35
2	Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang melaporkan realisasi DAU, PAD, DBH, dan belanja daerah di situs Badan Pusat Statistik.	35
	Periode penelitian (Tahun)	**3**
	Jumlah Kabupaten/kota yang menjadi sampel	**35**
	Total sampel dalam penelitian 35 x 3 Tahun	**105**

Tabel 4.1 Prosedur Penarikan Sampel 1

Berdasarkan table diatas dapat simpulkan bahwa jumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempublikasikan data realisasi APBD di situs Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 2018-2020 berjumlah 35. Dari 35 kabupaten/kota tersebut, semuanya melaporkan realisasi DAU, PAD, DBH, dan belanja daerah dalam situs Badan Pusat Statistik. Sedangkan total sampel penelitian ini adalah 35 Kabupaten/kota dikalikan 3 tahun penelitian, sehingga sampel penelitan berjumlah 105.

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Maksimum, minimum, mean, dan standar deviasi dufungsikan dalam memberikan gambaran atau deskripsi data Ghozali (2016).

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	105	440.041.244	1.461.114.316	987.641.608	252.709.332
PAD	105	179.224.409	2.516.646.593	396.430.237	318.992.346
DBH	105	17.113.151	235.660.117	43.865.390	38.887.119
Belanja Daerah	105	883.184.895	5.256.092.790	2.274.142.274	753.625.340
Valid N (listwise)	105				

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif 1

Sumber : Data Ouput SPSS 25, 2021

1. Variabel independen Dana Alokasi Umum (X1) pada Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki total sampel (N) sebanyak 105 pada periode 2018-

2020, diketahui nilai minimum dana alokasi umum adalah 440.041.244 terdapat pada Kota Magelang ditahun 2018 dikarenakan kota magelang merupakan daerah kebutuhannya relative kecil di tahun 2018 sehingga kota magelang mendapatkan transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat berupa DAU yang relatif kecil dan untuk nilai maksimum DAU sebesar 1.461.114.316 terdapat pada Kabupaten Banyumas ditahun 2020 dikarenakan kota banyumas memiliki potensi daerah yang kecil namun kebutuhannya besar, sehingga pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan berupa DAU yang relatif besar. Dan untuk nilai rata rata dari dana alokasi umum adalah sebesar 987.641.608 dengan standart deviasi sebesar 252.709.332 yang menunjukan nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai mean DAU, hal ini menunjukan bahwa penyebaran datanya merata.

2. Variabel independen Pendapatan Asli Daerah (X2) pada Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki jumlah sampel (N) sebanyak 105 pada periode 2018-2020, diketahui nilai minimum pendapatan asli daerah adalah 179.224.409 terdapat pada kabupaten Pekalongan ditahun 2018 dikarenakan pada tahun tersebut kota pekalongan menerima Pajak dan Retribusi daerah yang lebih kecil dibanding dengan kabupaten/kota lainnya sehingga mengakibatkan kabupaten pekalongan menerima PAD dengan nominal yang paling kecil dan nilai maksimum sebesar 2.516.646.593 terdapat pada Kota Semarang tahun 2020 dikarenakan kota semarang menjadi salah satu kota dengan nominal penerimaan pajak daerah tertinggi diantara kabupaten/kota lainnya, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap tinggina presentase

penerimaan PAD kota semarang. Nilai rata rata dari pendapatan asli daerah adalah sebesar 396.430.237 dengan standart deviasi lebih kecil dari nilai mean PAD dengan nilai sebesar 318.992.346, hal ini menunjukan bahwa penyebaran datanya merata.

3. Variabel independen Dana Bagi Hasil (X3) pada Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki jumlah sampel (N) sebanyak 105 pada periode 2018-2020 ,diketahui nilai minimum dana bagi hasil adalah 17.113.151 terdapat pada kabupaten Sukoharjo ditahun 2019 dikarenakan kabupaten tersebut menerima Dbh pajak dan Dbh Sumber dya alam yang lebih kecil dibanding dengan daerah lainnya, sehingga mengakibatkan daerah tersebut menjadi penerima DBH terendah dalam 3 tahun periode penelitian dan nilai maksimum sebesar 235.660.117 terdapat pada Kota Kudus tahun 2018 hal itu dikarenakan kota kudus adalah kota dengan penerimaan DBH cukai tembakau tertinggi di wilayah Jawa Tengah. Nilai rata rata dari dana bagi hasil adalah sebesar 413.865.390 dengan standart deviasi menunjukan nilai yang lebih kecil dari pada nilai rata rata yaitu sebesar 38.887.119, Dimana jika nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai mean maka hal itu menunjukan bahwa penyebaran datanya merata.
4. Variabel Dependen Belanja Daerah (Y) pada Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki jumlah sampel (N) sebanyak 105 pada periode 2018-2020 ,diketahui nilai minimum belanja daerah adalah 883.184.895 terdapat pada Kota Pekalongan ditahun 2018 dikarenakan menurut data yang ada kota pekalongan khususnya pada tahun 2018 menjadi daerah dengan tingkat belanja langsung dan tidak langsung yang relatif rendah dibanding daerah

lainnya. dan nilai maksimum sebesar 5.256.092.790 terdapat pada Kota Semarang tahun 2020 hal itu dikarenakan kota semarang dengan tingkat pendapatan dari sumber pajak yang paling tinggi dibanding dengan daerah lain dijawa tengah, hal itu menjadikan kota semarang menjadi kota dengan tingat belanja daerah yang sangat tinggi dalam beberapa tahun periode, semakin tinggi tingkat pendapatan suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pembelanjaannya. Nilai rata rata dari belanja daerah adalah sebesar 2.274.142.274 dengan standart deviasi lebih kecil yaitu sebesar 753.625.340. Dimana jika nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai mean maka menandakan bahwa penyebaran datanya merata.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan hasil suatu model regresi yang baik dan benar, analisis regresi memerlukan langkah pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis, maka dalam penelitian ini diperlukan uji asumsi klasik terlebih dahulu yang di antaranya meliputi : uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi yang dilakukan sebagai berikut

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas berguna untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi yang normal Ghozali (2016). Model regresi yang baik ialah model yang memiliki peredaran data normal atau mendekati normal. Dan untuk menguji apakah peredaran data normal atau tidak, maka dapat dideteksi dengan memakai analisis statistik *non-parametrik*

Kolmogorov-Smirnov (*K-S*) serta analisis grafik histogram dan *normal probability plot*. Berikut merupakan masing-masing analisis statistik *non paramtrik Kolmogrov-Smirnov (K-S)* dalam tabel 4.3 dan grafik histogram dalam gambar 4.2 *normal probablity plot*

Jika nilai probabilitas 0,05, maka asumsi normalitas terpenuhi. Jika probabilitas < 0,05, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000003
	Std. Deviation	161829006,36295885
Most Extreme Differences	Absolute	,110
	Positive	,087
	Negative	-,110
Kolmogorov-Smirnov Z		1,131
Asymp. Sig. (2-tailed)		,155
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Tabel 4.3 Uji Normalitas 1

Sumber : Data Ouput SPSS 25, 2021

Dalam tabel 4.3 hasil uji normalitas dengan menggunakan uji statistic non parametrik *Kolmogorov-Smirnov* telah menghasilkan nilai *Asymp. Sig*. (2-*tailed*) lebih dari taraf signifikansi (0,155 > 0,05) yang artinya data residual telah tersalurkan secara normal. Dengan kata lain, model regresi yang dipergunakan

telah melengkapi asumsi normalitas. Uji Normalitas juga dapat dibantu melalui analisis grafik yaitu Uji Normal P-Plot dan Grafik Histogram yang dapat menampilkan data terdistribusi normal atau tidak normal.

Gambar 4.1
Uji Normalitas Normal Probability Plot

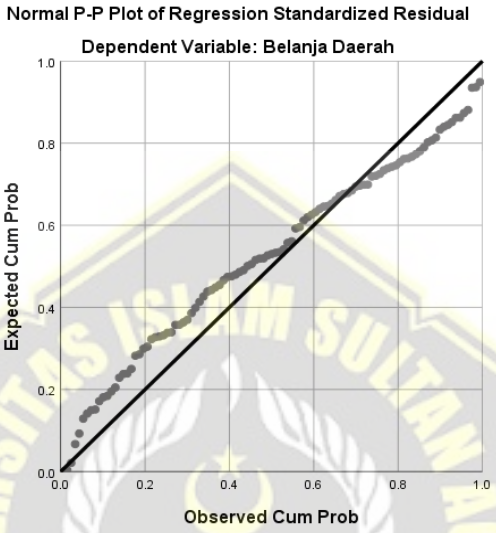

Gambar 4.1 Uji Normalitas Normal P Plot 1

Berdasarkan grafik normal p-plot (Gambar 4.1) menampilkan penyebaran titik yang mengikuti arah garis diagonal serta titik-titik menyebar dengan tetap mengikuti garis sehingga dapat disimpulkan jika distribusi datanya normal.

Gambar 4.2
Uji Normalitas Histogram

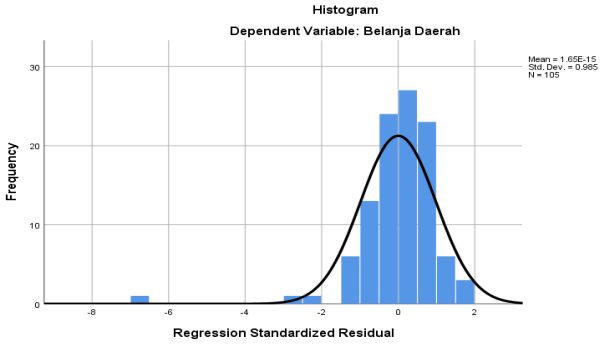

Gambar 4.2 Uji Normalitas Histogram 1

Dari hasil uji normalitas dengan memakai grafik histogram dan grafik normal p-plot dapat disimpulkan bahwa peredaran data normal. Dalam grafik histogram (gambar 4.2) menampilkan kurva histogram yang menampilkan bentuk menyerupai lonceng atau mempunyai kemiringan seimbang ke kiri dan ke kanan.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) uji multikolinearitas berfunsgsi untuk memeriksa apakah terdapat korelasi antar variabel independen dengan model regresi. Model regresi yang baik harus terbebas dari multikolinearitas. Deteksi terhadap ada atau tidaknya multikolinearitas dapat diperhatikan melalui nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), suatu model regresi yang bebas dari masalah multikolinearitas jika memiliki nilai toleransi lebih dari 0,1 dengan nilai VIF kurang dari 10.

Tabel 4.4
Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	DAU	.859	1.164
	PAD	.718	1.393
	DBH	.823	1.214

Tabel 4.4 Multikolinearitas 1

Sumber : Data Ouput SPSS 25, 2021

Hasil perhitungan mengungkapkan bahwa variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 yaitu variabel dana alokasi umum sebesar 0,859.

variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,718 dan variabel dana bagi hasil sebesar 0,823 yang mengungkapkan tidak terjadinya korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan mengungkapkan hal yang sama dimana variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 yaitu variabel dana alokasi umum sebesar 1,164. variabel pendapatan asli daerah sebesar 1,393 dan variabel dana bagi hasil sebesar 1,214. Maka dengan ini dapat diambil kesimpulan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

4.2.2.3 Uji Heteroskedestisitas

Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk memeriksa apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu observasi ke obsevasi lainnya Ghozali (2016) Model regresi yang baik ialah jika *variance* dari residual satu observasi ke observasi lain tetap maka disebut homoskedastisitas, namun jika berbeda akan disebut Heteroskedastisitas. Heterokedastisitas dapat diperhatikan melalui grafik *scatterplot* Antara SRESID pada sumbu Y dan ZPRED pada sumbu X. Apabila pola yang ditampilkan pada grafik menunjukan titik-titik menyebar secara acak (tanpa pola yang jelas) serta tersebar di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Gambar 4.3
Uji Heteroskedastisitas

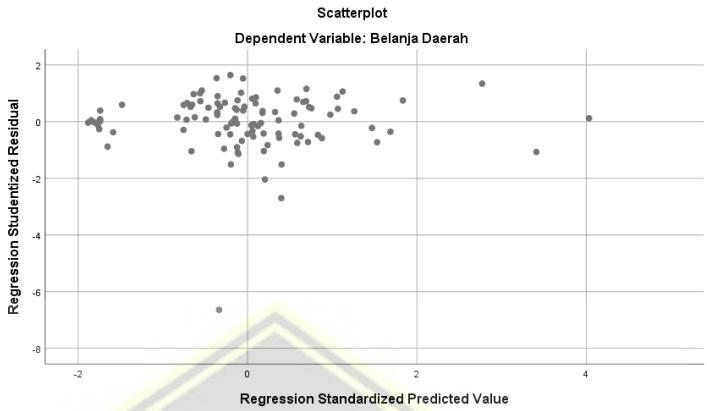

Gambar 4.3 Uji Heteroskedestisitas 1

Dari gambar diatas dapat dilihat pada pola penyebaran titik yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, selain itu untuk pola penyebaran titik datanya membentuk pola yang menggelombang, melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, jadi dapat diambil kesimpulan jika model regresi ini baik karena tidak terjadinya heteroskedastisitas.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi berfungsi dalam melakukan pengujian apakah dalam model regresi linier berganda terdapat korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) Ghozali (2016). Jika terdapat korelasi, maka dapat dinamakan *problem* autokorelasi. Autokorelasi muncul karena pengamatan beruntun sepanjang waktu berkaitan antara satu dengan yang lain. Sedangkan untuk suatu model regresi yang baik ialah regresi yang terbebas dari autokorelasi.

Uji autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji Durbin-Watson. Tabel disajikan hasil dari uji Durbin-Watson. Aturan pengambilan keputusan untuk uji Durbin-Watson adalah nilai statistik dari uji Durbin-Watson yang lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3 diindikasi terjadi autokorelasi.

Tabel 4.5
Dasar Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negative	Totak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negative	No decision	$4 - du \, . \, d \, . \, 4 \, . \, dl$
Tidak ada autokorelasi positif maupun negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi 1

Sumber: Ghozali (2016)

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.977[a]	.954	.953	164225044.795	2.164
a. Predictors: (Constant), DBH, DAU, PAD					
b. Dependent Variable: Belanja Daerah					

Tabel 4.6 Hasil Autokorelasi 1

Sumber : Data Output SPSS 25, 2021

Tabel 4.7
Durbin-Watson

DW	DL	DU	4-DL	4-DU
2.164	1.6237	1.7411	2.3763	2.2589

Tabel 4.7 Durbin Watson 1

Berdasarkan tabel diatas nilai *durbin-watson* sebesar 2.164. Pada penelitian ini jumlah data (n) = 105, serta k = 3 (k merupakan jumlah variabel independen) maka diperoleh nilai dl sebesar 1.6237, nilai du sebesar 1,7411, nilai 4-dl sebesar 2.3763 dan nilai 4-du sebesar 2.2589. Oleh karena itu diperoleh persamaan du < dw < 4-du yang dapat diartikan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang dipergunakan pada penelitian ini ialah analisis regresi linear berganda *(multiple linear regression).* Analisis regresi linear berganda dipergunakan Jika jumlah variabel independennya minimal berjumlah sebesar 2 variabel independen. Penggunaan analisis regresi linear berganda ditujukan untuk memilih pengaruh variabel bebas yang biasa disebut dengan X terhadap variabel tidak bebas yg biasa disebut dengan Y Adapun model persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$BD = \alpha + \beta 1\ DAU + \beta 2\ PAD + \beta 3 DBH\ + e$$

Keterangan:

BD = Belanja daerah

α = Konstanta Regresi

β1,β2, β3 = Koefisien regresi masing – masing variabel independen

DAU = Dana Alokai Umum

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH = Dana Bagi Hasil

e = *Error Term*

Tabel 4.8
Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-276292882.202	67191335.918		-4.112	.000
	DAU	2.120	.069	.711	30.844	.000
	PAD	1.043	.060	.442	17.506	.000
	DBH	.980	.456	.051	2.148	.034

Tabel 4.8 Analisis Regresi Linier 1

Sumber : Data Ouput SPSS 25, 2021

Pengolahan data tersebut memperoleh hasil persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

BD = - 276292882.202+2,120 β1 + 1,043 β 2+ 0,980 β3 + e

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diinterpretasi sebagai berikut:

1. Diketahui nilai konstanta adalah **- 276292882.202** dengan nilai sig 0.000 < 5% Nilai tersebut dapat diartikan apabila nilai variabel independen DAU, PAD, DBH bernilai tetap, maka nilai variabel dependen belanja daerah bernilai (-) 276292882.202

2. Nilai koefisien regresi dari dana alokasi umum adalah 2,120 bertanda positif dengan nilai sig 0.000 < 5% , artinya DAU bernilai positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik pengelolaan DAU maka akan semakin besar Belanja Daerah
3. Nilai koefisien regresi dari pendapatan asli daerah adalah 1,043 dengan nilai sig 0.000 < 5%, artinya PAD bernilai positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukan bahwa semakin baik tingkat pengelolaan dan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan potensi daerah yang diterima dalam bentuk PAD maka akan semakin meningkatkan kemandirian pemda dalam membiayai semua kebutuhan Belanja Daerah
4. Nilai koefisien regresi dari dana bagi hasil adalah 0,980 dengan nilai sig 0.034 < 5%, yang artinya DBH bernilai positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukan bahwa jika suatu daerah memaksimalkan pendapatan dan pengelolaan DBH maka akan berdampak meningkatkan Belanja Daerah

4.4 Uji Hipotesis

4.4.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menunjukan apakah semua variabel bebas yang digunakan dalam model regresi mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel tak bebas belanja daerah.

Tabel 4.9
Uji Pengaruh Simultan dengan Uji F

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	56342963546341810000.000	3	18780987848780603000.000	696.369	.000[b]
	Residual	27239563991382 60000.000	101	26969865338002 572.000		
	Total	59066919945480 070000.000	104			
a. Dependent Variable: Belanja Daerah						
b. Predictors: (Constant), DBH, DAU, PAD						

Tabel 4.9 Uji F 1

Sumber : Data Output SPSS 25, 2021

Berdasarkan hasil SPSS terdapat nilai sig. Sebesar 0,000 < 0.05 artinya secara bersamaaan variabel-variabel bebas yaitu dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil mempunyai pengaruh terhadap belanja daerah. Hasil pengujian menurut tabel adalah nilai F hitung ternyata lebih besar dari nilai F tabel (696,369>2,69) maka dapat diambil kesimpulan bahwa dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah.

4.4.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengungkapkan seberapa jauh variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan memakai tingkat signifikansi sebesar 5%, jika nilai sig. <0,05 artinya satu

variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai sig. > 0,05 artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengambilan ketentuan juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai antara t_{hitung} dengan nilai t_{tabel}. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada α = 5% artinya tidak memiliki pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Namun jika pada Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada α = 5% artinya ada tingkat pengaruh yang signifikan Antara variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

H1 : Dana Alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah		
Model	t	Sig.
DAU	30.844	0.000

Nilai sigifikansi variabel DAU adalah 0,000 nilai ini lebih kecil dari 0,05 atau 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung untuk variabel dana alokasi umum adalah sebesar 30,844 dan t tabel untuk d*f*= n-k-1 (105 – 3- 1 = 101 dan α = 5% diketahui sebesar 1,98373 maka thitung > t tabel (30,844 > 1,98373), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan Positif terhadap belanja daerah. Dengan demikian H1 yang menyatakan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah dapat diterima.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

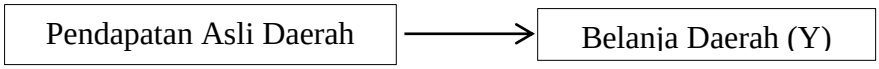

H2 : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Belanja Daerah		
Model	t	Sig.
PAD	17.506	0.000

Nilai sigifikansi variabel PAD adalah 0,000 nilai ini lebih kecil dari 0,05 atau 0,000 < 0,05 dan nilai thitung untuk variabel pendapatan asli daerah adalah sebesar 17,506 dan ttabel untuk d*f*= n-k-1 (105 – 3 -1 = 101) dan α = 5% diketahui sebesar 1,98373 maka thitung > ttabel (17,506 > 1,98373), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pendapatan asli daerah memiliki berpengaruh yang signifikan positif terhadap belanja daerah. Dengan demikian H2 yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah dapat diterima.

3. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

H3 : Dana Alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah		
Model	t	Sig.
PAD	2.148	0.034

Nilai sigifikansi variabel DBH adalah 0,034 nilai ini lebih besar dari 0,05 atau 0,034 > 0,05 dan nilai thitung untuk variabel dana bagi hasil adalah sebesar 2,148 dan ttabel untuk d*f*= n-k-1 (105 – 3-1 = 101) dan α = 5%

diketahui sebesar 1,98373 maka thitung > ttabel (2,148 > 1,98373), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel dana bagi hasil mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap belanja daerah. Dengan demikian H3 yang menyatakan dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja daerah di terima

4.4.3 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi (R_2) berfungsi untuk mengukur seberapa jauh kapasitas variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berikut adalah hasil perhitungan koefisien determinasi hipotesis

Tabel 4.10
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Std. Error of the Estimate
1	.977[a]	.954	164225044.795

Tabel 4.10 Koefisien Deerminasi 1

Sumber : Data Output SPSS 25, 2021

Berdasarkan Tabel 4.8, diketahui nilai koefisien determinasi (*R-Square*) adalah 0,954. Nilai tersebut mempunyai arti variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil secara bersama-sama atau simultan mampu mempengaruhi belanja daerah sebesar 95,4%, sisanya sebesar 4,6% dijelaskan oleh variabel atau faktor lainnya diluar penelitian ini.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka peneliti akan memperjelas secara terperinci pada pembahasan hasil uji hipotesis. Adapun pembahasan dari setiap hipotesis dala penelitian ini adalah :

4.5.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian ini menyatakan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah, dikarenakan DAU sendiri adalah sumber pendapatan daerah yang relatif potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemda dalam menerima dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah, Hal ini menandakan bahwa DAU menjadi dana yang sangat berpotensi dalam membantu suatu daerah sebagai upaya memenuhi kekurangan sumber penerimaan untuk belanja daerahnya. Hal ini dibuktikan dengan naiknya proporsi penerimaan DAU di ikuti oleh kenaikan belanja daerah, dan belanja daerah mengalami kenaikan adalah suatu bentuk upaya pemda untuk membangun daerahnya supaya masyarakat mampu merasakan peningkatan kesejahteraan dan menjadi titik keberhasilan pemerintah pusat dalam mengatasi ketimpangan fiscal yang terjadi antar pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Malau dkk (2020) menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah. Dan didukung dengan pernyataan Halim (2009) yang mengungkapkan bahwa DAU ialah transfer yang besifat universal dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagai bentuk upaya mengatasi ketimpangan horizontal yang tujuan utamanya yaitu untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

4.5.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil pengujian uji t (parsial) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini terjadi dikarenakan semakin besar pendapatan daerah yang diperoleh, maka hal tersebut menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam memaksimalkan semua sumber daya yang dimilikinya. Semakin berhasil pemda dalam memaksimalkan PAD nya maka semakin mandiri juga pemda dalam memenuhi setiap kebutuhan belanja daerahnya, karena PAD sejatinya memang ditujukan untuk membantu membiayai kebutuhan belanja daerah dalam upaya meningkatkan kesejaheraan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan Pradipta dan Jatmiko (2018) mengungkapkan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan positif dan terhadap belanja daerah. Hal ini disebabkan karena PAD merupakan suatu pendapatan yang diterima dari hasil daerah, contohnya Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan Pendapatan lain yang sah

4.5.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Daerah

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, Dikarenakan DBH menjadi salah satu alat ukur tentang kesuksesan pemerintah daerah dalam memaksimalkan penerimaan pajak dan sumber daya alam daerahnya lainya. jika suatu daerah menerima pajak daerah dan hasil pengelolaan sumber

daya alam tinggi, maka penerimaan DBH akan semakin tinggi. Begitu juga jika pendapatan pajak daerah serta hasil pengelolaan SDA rendah, maka DBH yang diperoleh ikut rendah. Disisi lain kapasitas milik setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah mempunyai perbedaan, sehingga penerimaan DBH disetiap daerah juga berbeda. Hasil dari pendapatan DBH dapat difungsikan sebagai sarana dalam peningkatan pembangunan serta kesejahteraan setiap daerah. Pembangunan serta pembiayaan lain yang ada kaitannya dengan manajemen kekayaan daerah akan mampu memberi dampak terhadap besarnya belanja daerah. Sehingga semakin besar DBH, maka akan semakin besar pula belanja daerahnya.

Hal ini sejalan dengan penelitian Mulyati dan Yusriadi (2018) yang menyatakan DBH memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap belanja daerah. Hasil ini didukung pendapat Arbie (2013) yang dinyatakan Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2020. Penelitian ini. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada 35 Kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan menggunakan metode SPSS 25, maka Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Belanja Daerah Hal ini dipicu karena DAU merupakan sumber dana transfer yang penting, transfer dana dari pemerintah pusat ini merupakan salah satu transfer dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk setiap daerah sebagai konsekuensi atas tidak meratanya kapasitas keuangan, ekonomi dan sumber daya alam masing-masing daerah daerah.
2. Variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah. Dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan daerah yang dipergunakan dalam pemenuhan kebutuhan belanja daerah. Peningkatan jumlah PAD pada Kabupaten/kota di Jawa Tengah setiap tahunnya menjelaskan mengenai kinerja daerah

yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam mengelola potensi yang dimiliki oleh daerahnya untuk dijadikan PAD. Salah satu sumber PAD terbesar yaitu pajak daerah, sehingga apabila terjadi peningkatan PAD maka kesadaran masyarakan akan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya jugamengalami peningkatan. Selanjutnya tugas pemerintah daerah ialah memperbaiki fasilitas publik sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari pajak yang telah dibayarkan

3. Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah hal itu dikarenakan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Tahun pengamatan penelitian ini hanya mencakup tiga tahun penelitian yaitu 2018, 2019, 2020.
2. Pemilihan variabel bebas pada penelitian ini hanya sebatas variabel DAU, PAD, dan DBH untuk menjelaskan variabel Belanja Daerah, sedangkan masih banyak variabel lain yang dapat mengukur Belanja Daerah yang tidak termasuk pada penelitian ini.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan serta keterbatasan yang sudah dijelaskan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan mampu digunakan untuk acuan penelitian selanjutnya dan Pemerintah Daerah yaitu :

1. Bagi Peneliti selanjutnya
    a. Diharapkan mampu menggunakan atau menambahkan Variabel-variabel lain yang lebih bervariasi, seperti jenis-jenis penerimaan yang lain, pertumbuhan ekonomi, ataupun faktor lainnya yang berpotensi mempengaruhi Belanja Daerah
    b. Menggunakan tahun penelitiaan yang lebih panjang untuk melihat tren penelitian yang ada dan menggunakan data terbaru supaya dapat mengembangkan lebih lanjut penelitian ini.
2. Bagi Pemerintah Daerah
    a. Belanja Daerah difungsikan untuk lebih pada meningkatkan rasio belanja untuk kepentingan masyarakat seperti meningkatkan belanja daerah. Dalam penggunaannya, Belanja Daerah harus tetap mengutamakan kemampuan, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap program strategis daerah dalam rangka meningkatkan fasilitas dan kesejahteraan masyarakat.

b. Melihat adanya fenomena tidak signifikannya pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap belanja daerah, maka pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah harus lebih mengoptimalkan lagi penggunaan DBH dan DAU dalam rangka memberikan kontribusi pada pendanaan setiap kebutuhan daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

PERMENDAGRI NO 13 (2006). *Peraturan mentri Dalam Negri No 13*.

Undang-Undang No. 28 (2009). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.

Undang-Undang No. 34 (2000). *Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.

Abdul Halim. (2002). *Akuntansi Dan Keuangan Daerah*. Salemba Empat.

Abdul Halim. (2009). *Akuntansi sektor publik Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi Pert). Salemba Empat.

Agus Widarjono. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya*. Ekonosia.

Amalia, W. R., Nor, W., & Nordiansyah, M. (2015). Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), DAN Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan (2009 – 2013). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*

Arbie Gugus Wandira. (2013). PENGARUH PAD, DAU, DAK, DAN DBH TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang*.

Bowo Laksono, B., Jurusan Akuntansi, S., Ekonomi, F., & Negeri Semarang, U. (2014). Accounting Analysis Journal Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. In *AAJ*.

Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi

Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)*.

Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *INOVASI*.

Gani, W., & Kristanto, S. B. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Khusus terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.

Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi analisis multi variate dengan program IBM SPSS 19*. BPUNDIP.

Imam Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Imam Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Universitas Diponegoro.

Jogiyanto. (2014). *Analisis dan desain sistem informasi : pendekatan terstruktur teori dan praktik aplikasi bisnis*. andi offset.

Jolianis. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pelangi, 7*

Julitawati, E., Darwanis, & Jalaluddin. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*.

Kuncoro, H. (2007). Aspp-08 1 Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah. *Simposium Nasional Akuntansi X, juli*.

Lian Arke Mokorowu, Debby Ch. Rotinsulu, D. S. M. E. (2020). *Pengaruh pendapatan asli daerah (pad), dana bagi hasil (dbh, dana alokasi umum (dau) dan dana alokasi khusus (dak) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten minahasa tenggara*. *21*(04), 81–94.

Malau, Y. N., Lase, W. L., Sagala, V. C. B., & Lestari, D. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Darah Di Provinsi Aceh 2013-2017. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.

Menteri, & 19/PMK.07/2020, K. R. I. N. (2020). *Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019* (p. 11).

Mulyati, S., & Yusriadi, Y. (2018). Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh. *Agregat*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 184.

Peraturan Pemerintah Nomor 12. (n.d.). *Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan keuangan daerah* (p. 2019). www.djpk.depkeu.go.id

Pradipta, W. T., & Jatmiko, B. (2018). Pengaruh Flypaper Effect, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2016). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*.

Rahmawati, M., & Fajar, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan

Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*.

Rukmana, W. V. (2013). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. *Journal Akutansi*, *53*(9), 1689–1699.

Salindeho, C. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *4*(3), 705–716.

Sarwono, E. (2011). Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten / Kota Se Indonesia Tahun Anggaran 2010-2011. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro*.

sugiyono. (2013). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&*. Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999*, 2.

Undang Undang No 23. (2004). *Peraturan Pemerintah Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang Undang No 33. (2004). *Peraturan Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

https://bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=statistik+keuangan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan

https://jateng.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=statistik+keuangan&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampilkan

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Tabulasi Tahun 2018

Lampiran 1 Data Tabulasi 2018 1

Kab/Kota	Tahun	Belanja Daerah	DAU	PAD	DBH
Kab. Banjarnegara	2018	2.119.096.683	959.486.489	235.994.436	30.048.651
Kab. Banyumas	2018	3.319.060.759	1.373.971.809	648.326.914	42.908.155
Kab. Batang	2018	1.687.215.726	781.383.387	237.547.973	36.199.222
Kab. Blora	2018	2.116.475.561	926.682.649	203.166.113	115.863.714
Kab. Boyolali	2018	2.203.112.762	1.014.602.019	342.957.214	42.900.294
Kab. Brebes	2018	2.825.364.002	1.321.798.057	346.907.973	32.660.115
Kab. Cilacap	2018	3.260.826.229	1.362.443.518	497.353.613	72.313.259
Kab. Demak	2018	2.050.065.954	894.376.873	342.324.870	35.461.534
Kab. Grobogan	2018	2.345.537.047	1.094.460.434	315.743.176	40.960.700
Kab. Jepara	2018	2.300.574.122	984.914.974	369.330.455	39.836.896
Kab. Karanganyar	2018	2.008.837.021	978.664.650	343.156.469	38.881.728
Kab. Kebumen	2018	2.652.055.178	1.234.003.169	351.965.057	29.627.426
Kab. kendal	2018	2.148.450.040	956.331.079	335.842.483	47.528.990
Kab. klaten	2018	2.973.118.685	1.237.967.327	373.770.434	48.233.590
Kab. kudus	2018	1.957.701.652	807.056.991	337.364.609	235.660.117
Kab. magelang	2018	2.486.540.561	1.060.540.612	325.089.093	36.431.592
Kab. pati	2018	2.725.893.398	1.189.796.870	383.912.843	33.452.113
Kab. Pekalongan	2018	2.160.744.430	915.154.037	311.288.144	26.222.396
Kab. pemalang	2018	2.324.288.798	1.180.834.332	300.481.887	30.316.211
Kab. purbalingga	2018	1.924.908.433	881.574.483	282.679.019	25.434.252
Kab. purworejo	2018	2.255.674.841	924.251.795	278.952.386	31.642.090
Kab. rembang	2018	1.814.662.872	771.584.367	305.676.436	41.011.688
Kab. semarang	2018	2.171.799.811	952.362.147	383.475.678	40.449.487
Kab. sragen	2018	2.236.802.757	1.049.016.918	334.303.284	27.428.744
Kab. sukoharjo	2018	2.050.161.904	906.416.629	433.485.481	26.507.198
Kab. tegal	2018	2.127.372.729	1.144.494.182	372.282.676	29.421.275
Kab. temanggung	2018	1.670.309.286	793.485.677	252.019.935	50.075.868
Kab. wonogiri	2018	2.246.861.249	1.124.733.467	269.032.428	27.810.006
Kab. Wonosobo	2018	1.856.167.369	827.791.657	226.819.478	34.626.573
Kota Magelang	2018	937.345.746	440.041.244	249.877.425	24.423.094
kota pekalongan	2018	883.184.895	449.055.738	179.224.409	26.693.032
kota salatiga	2018	923.538.238	448.067.710	208.926.057	24.417.998
kota semarang	2018	4.506.407.630	1.190.422.387	1.821.274.103	168.784.360
kota surakarta	2018	1.914.818.394	826.587.795	525.125.555	47.513.325
kota tegal	2018	916.730.789	482.150.715	275.021.448	25.571.473

Lampiran 2 Data Tabulasi Tahun 2019

Kab/Kota	Tahun	Belanja Daerah	DAU	PAD	DBH
Kab. Banjarnegara	2019	2.123.033.797	999.003.344	257.700.650	22.981.870
Kab. Banyumas	2019	3.457.550.201	1.437.036.239	686.805.512	28.656.208
Kab. Batang	2019	1.755.066.561	817.365.659	245.836.087	31.712.053
Kab. Blora	2019	2.241.213.149	966.573.992	264.338.953	119.847.294
Kab. Boyolali	2019	2.381.601.865	1.045.669.923	395.431.863	37.591.656
Kab. Brebes	2019	3.132.251.741	1.373.396.371	379.091.299	29.095.102
Kab. Cilacap	2019	3.283.321.138	1.423.200.397	574.276.794	61.674.610
Kab. Demak	2019	2.309.815.551	946.467.336	407.400.541	32.191.545
Kab. Grobogan	2019	2.551.226.710	1.144.560.870	344.559.032	34.446.483
Kab. Jepara	2019	2.337.503.289	1.039.864.085	384.979.093	33.697.485
Kab. Karanganyar	2019	2.262.015.969	1.018.544.740	387.763.013	29.554.922
Kab. Kebumen	2019	2.809.549.445	1.279.681.428	409.163.433	22.159.109
Kab. kendal	2019	2.331.683.034	998.236.127	350.500.850	41.076.867
Kab. klaten	2019	2.682.356.734	1.282.250.122	311.648.401	32.229.987
Kab. kudus	2019	2.061.664.157	851.036.584	343.824.123	209.525.165
Kab. magelang	2019	2.568.593.603	1.097.366.974	417.178.100	28.247.886
Kab. pati	2019	2.870.260.403	1.240.426.636	363.997.154	24.894.732
Kab. Pekalongan	2019	2.183.534.790	974.248.885	341.344.415	21.533.683
Kab. pemalang	2019	2.584.470.870	1.223.060.205	350.559.140	24.594.206
Kab. purbalingga	2019	2.062.727.850	918.228.685	305.996.806	20.781.607
Kab. purworejo	2019	2.186.289.226	963.312.191	280.396.156	19.577.301
Kab. rembang	2019	1.863.502.828	799.760.392	308.445.489	38.779.148
Kab. semarang	2019	2.312.242.117	1.001.565.375	429.011.081	32.240.120
Kab. sragen	2019	2.092.140.284	1.083.308.681	368.325.800	21.040.339
Kab. sukoharjo	2019	2.114.107.876	946.104.486	458.742.224	17.113.151
Kab. tegal	2019	2.717.431.599	1.198.561.641	436.003.393	22.161.572
Kab. temanggung	2019	1.841.033.640	828.948.502	278.313.775	45.213.757
Kab. wonogiri	2019	2.455.975.320	1.181.037.066	287.221.630	22.110.456
Kab. Wonosobo	2019	2.024.794.958	877.474.203	238.371.743	29.449.520
Kota Magelang	2019	995.162.120	455.177.029	273.582.933	19.159.018
kota pekalongan	2019	954.397.013	475.842.089	212.777.435	19.027.230
kota salatiga	2019	942.687.426	469.967.335	236.086.898	18.865.461
kota semarang	2019	4.633.934.341	1.317.186.595	2.066.333.417	114.095.355
kota surakarta	2019	2.012.408.113	879.123.635	546.020.008	32.359.859
kota tegal	2019	1.046.575.213	502.969.026	285.575.789	18.911.296

Lampiran 2 Data tabulasi 2019 1

Lampiran 3 Data Tabulasi Tahun 2020

Kab/Kota	Tahun	Belanja Daerah	DAU	PAD	DBH
Kab. Banjarnegara	2020	2.247.978.404	1.015.129.697	263.413.965	29.408.261
Kab. Banyumas	2020	3.743.918.764	1.461.114.316	729.892.819	42.143.126
Kab. Batang	2020	1.890.617.426	835.669.833	246.398.163	40.829.780
Kab. Blora	2020	2.012.812.302	883.338.891	236.965.596	91.960.413
Kab. Boyolali	2020	2.466.443.423	1.064.047.626	369.369.271	41.057.303
Kab. Brebes	2020	3.270.994.179	1.381.401.958	398.649.681	32.172.349
Kab. Cilacap	2020	3.194.042.963	1.295.279.562	495.407.770	66.506.132
Kab. Demak	2020	2.384.405.766	960.411.394	404.373.956	37.080.664
Kab. Grobogan	2020	2.615.085.523	1.215.026.908	332.001.228	42.574.259
Kab. Jepara	2020	2.035.631.470	948.599.557	386.441.887	46.243.233
Kab. Karanganyar	2020	2.287.236.745	1.027.021.995	357.146.402	35.417.454
Kab. Kebumen	2020	3.033.756.768	1.322.910.412	417.693.691	30.513.954
Kab. kendal	2020	2.448.834.514	1.006.102.383	425.302.414	44.255.800
Kab. klaten	2020	2.906.327.298	1.297.168.894	304.546.856	39.379.096
Kab. kudus	2020	1.911.471.464	849.410.428	378.701.780	213.560.102
Kab. magelang	2020	2.713.496.678	1.109.430.605	406.095.299	36.028.834
Kab. pati	2020	2.900.220.672	1.254.698.193	351.859.894	33.257.963
Kab. Pekalongan	2020	2.446.656.142	979.933.360	466.818.350	26.704.775
Kab. pemalang	2020	2.828.842.885	1.241.959.529	309.060.518	23.112.248
Kab. purbalingga	2020	942.744.245	934.782.107	284.009.239	25.572.950
Kab. purworejo	2020	2.483.287.920	1.011.560.710	326.571.675	26.245.641
Kab. rembang	2020	1.964.433.830	810.570.557	307.258.622	43.942.090
Kab. semarang	2020	2.454.223.181	1.010.270.390	479.870.281	38.783.479
Kab. sragen	2020	2.312.886.893	1.105.770.343	338.220.314	27.906.860
Kab. sukoharjo	2020	2.392.529.962	953.962.609	332.207.075	32.285.325
Kab. tegal	2020	2.891.805.253	1.219.309.940	450.742.220	30.166.591
Kab. temanggung	2020	1.981.489.275	854.160.529	266.913.818	52.009.961
Kab. wonogiri	2020	2.474.910.262	1.192.822.108	252.340.642	28.278.654
Kab. Wonosobo	2020	2.055.345.635	889.213.906	224.697.827	33.596.113
Kota Magelang	2020	995.607.354	460.404.050	255.038.220	23.861.159
kota pekalongan	2020	1.055.857.482	480.230.431	218.020.320	25.183.473
kota salatiga	2020	1.006.404.906	475.828.296	228.004.915	22.893.650
kota semarang	2020	5.256.092.790	1.299.131.994	2.516.646.593	141.348.249
kota surakarta	2020	1.616.324.770	799.696.465	303.178.239	52.426.543
kota tegal	2020	1.278.393.100	512.935.790	333.012.742	25.246.220

Lampiran 3 Data tabulasi 2020 1

Lampiran 4 Website Sumber Data

1. Website data 2018 -2019 di BPS Provinsi Jawa Tengah

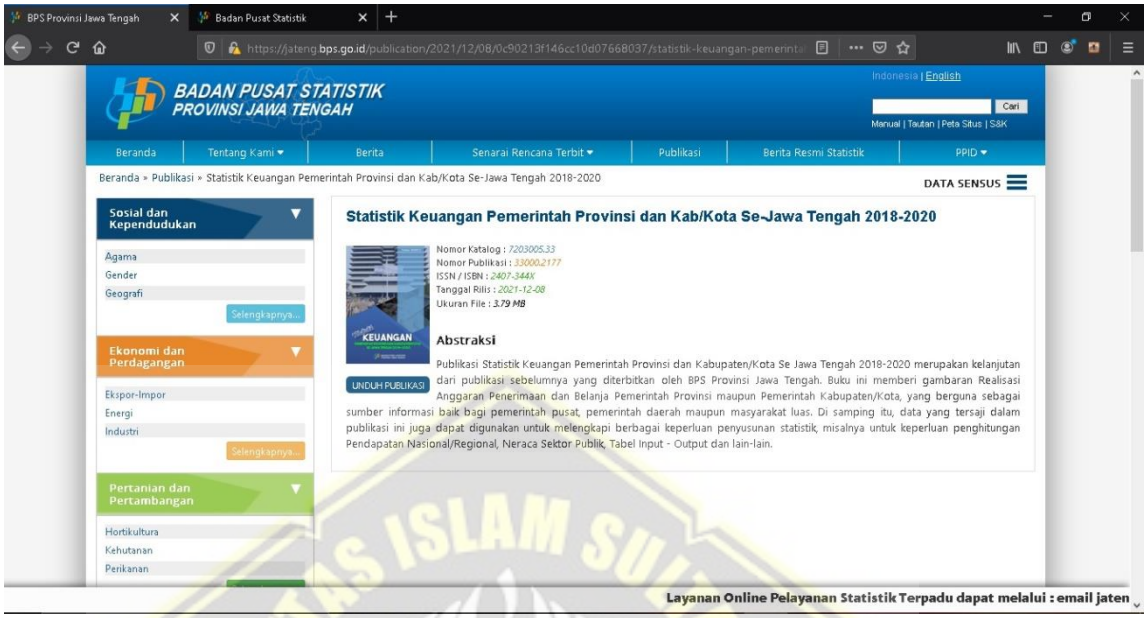

Lampiran 4 Website Sumber Data 1

2. Website data 2020 di BPS Pusat RI

Lampiran 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	105	440.041.244	1.461.114.316	987.641.608	252.709.332
PAD	105	179.224.409	2.516.646.593	396.430.237	318.992.346
DBH	105	17.113.151	235.660.117	43.865.390	38.887.119
Belanja Daerah	105	883.184.895	5.256.092.790	2.274.142.274	753.625.340
Valid N (listwise)	105				

Lampiran 5 Uji statistik deskriptif 1

Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik 1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000003
	Std. Deviation	161829006,36295885
Most Extreme Differences	Absolute	,110
	Positive	,087
	Negative	-,110
Kolmogorov-Smirnov Z		1,131
Asymp. Sig. (2-tailed)		,155
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

a. Uji Normalitas Normal Probability Plot

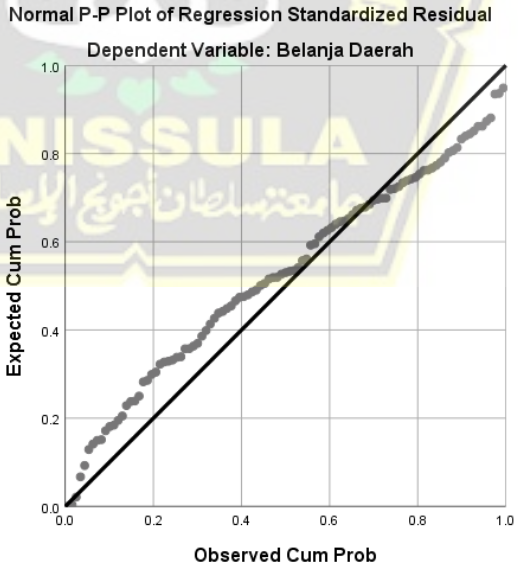

b. Uji Normalitas Histogram

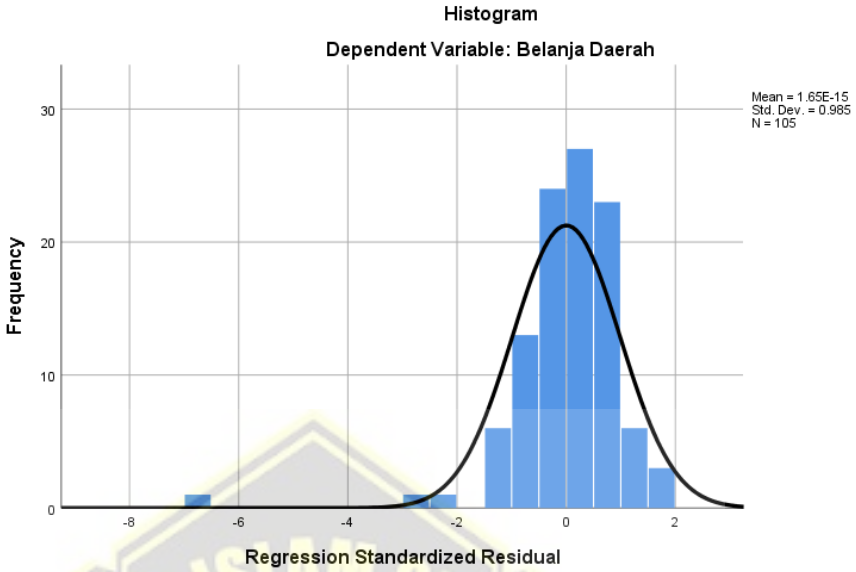

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-276292882.202	67191335.918		-4.112	.000		
	DAU	2.120	.069	.711	30.844	.000	.859	1.164
	PAD	1.043	.060	.442	17.506	.000	.718	1.393
	DBH	.980	.456	.051	2.148	.034	.823	1.214

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

3. Uji Heteroskedestisitas

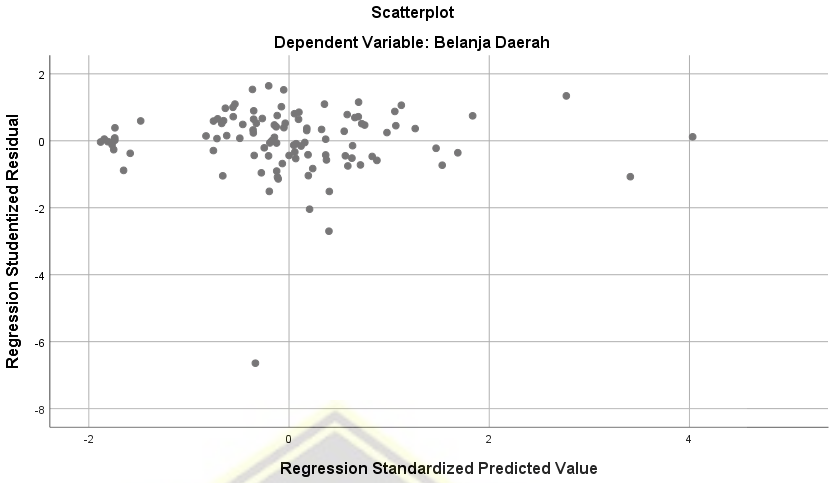

4. Dasar Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negative	Totak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negative	No decision	$4 - du \, . \, d \, . \, 4 \, . \, dl$
Tidak ada autokorelasi positif maupun negatif	Tidak ditolak	$du < d < 4 - du$

5. Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.977[a]	.954	.953	164225044.795	2.164

a. Predictors: (Constant), DBH, DAU, PAD

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

6. Durbin-Watson

DW	DL	DU	4-DL	4-DU
2.164	1.6237	1.7411	2.3763	2.2589

Lampiran 7 Analisis Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-276292882.202	67191335.918		-4.112	.000		
	DAU	2.120	.069	.711	30.844	.000	.859	1.164
	PAD	1.043	.060	.442	17.506	.000	.718	1.393
	DBH	.980	.456	.051	2.148	.034	.823	1.214

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Lampiran 7 Analisis Regresi 1

Lampiran 8 Uji Hipotesis

1. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Lampiran 8 Uji Hipotesis 1

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	56342963546341810000.000	3	18780987848780603000.000	696.369	.000[b]
	Residual	2723956399138260000.000	101	2696986533800572.000		
	Total	59066919945480070000.000	104			
a. Dependent Variable: Belanja Daerah						
b. Predictors: (Constant), DBH, DAU, PAD						

2. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Coefficients[a]								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-276292882.202	67191335.918		-4.112	.000		
	DAU	2.120	.069	.711	30.844	.000	.859	1.164
	PAD	1.043	.060	.442	17.506	.000	.718	1.393
	DBH	.980	.456	.051	2.148	.034	.823	1.214
a. Dependent Variable: Belanja Daerah								

3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	56342963546341810000.000	3	18780987848780603000.000	696.369	.000[b]
	Residual	27239563991382 60000.000	101	26969865338002 572.000		
	Total	59066919945480 070000.000	104			
a. Dependent Variable: Belanja Daerah						
b. Predictors: (Constant), DBH, DAU, PAD						

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA